KONSEP EKONOMI KERAKYATAN MUBYARTO PERSPEKTIF ETIKA EKONOMI ISLAM

Oleh:
Innani Mar'atus Sholichah
NIM.: 15913023

Pembimbing:
Dr. Yusdani, M.Ag

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi

YOGYAKARTA
2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Innani Mar'atus Sholichah
NIM	: 15913023
Konsentrasi	: Ekonomi Islam
Judul	: Konsep Ekonomi Kerakyatan Mubyarto Perspektif Etika Ekonomi Islam

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 28 Juli 2017

Yang menyatakan,



Innani Mar'atus Sholichah

PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 1089/PS-MSI/Peng./VIII/2017

TESIS berjudul : **KONSEP EKONOMI KERAKYATAN MUBYARTO PERSPEKTIF ETIKA EKONOMI ISLAM**

Ditulis oleh : Innani Mar'atus Sholichah

N. I. M. : 15913023

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ekonomi.

Yogyakarta, 30 Agustus 2017
Ketua,

Dr. Hujair AH Sanaky, MSI

PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM (S2)
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp/Fax (0274) 523637 e-mail: msi@uii.ac.id

TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Nama	:	Innani Mar'atus Sholichah
Tempat/tgl lahir	:	Klaten, 1 September 1992
N. I. M.	:	15913023
Konsentrasi	:	Ekonomi Islam
Judul Tesis	:	**KONSEP EKONOMI KERAKYATAN MUBYAR PERSPEKTIF ETIKA EKONOMI ISLAM**

Ketua	: Dr. Anton Priyo Nugroho, SE., MM	(.....
Sekretaris	: Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag.	(.....
Pembimbing	: Dr. Yusdani, M.Ag..	(.....
Penguji	: Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS.	(.....
Penguji	: Dr. M. Muslich KS., M.Ag.	(.....

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 24 Agustus 2017

Pukul : 12.30 – 13.30 WIB

Hasil : **Lulus**

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII

Dr. Hujair AH Sanaky, MSI

PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 1658/PS-MSI/ND/VIII/2017

TESIS berjudul : **KONSEP EKONOMI KERAKYATAN MUBYARTO PERSPEKTIF ETIKA EKONOMI ISLAM**

Ditulis oleh : Innani Mar'atus Sholihah

NIM : 15913023

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Pascasarjana, Magister Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yogyakarta, 18 Agustus 2017
Ketua,

Dr. Hujair AH Sanaky, MSI.

PERSETUJUAN

Judul	: Konsep Ekonomi Kerakyatan Mubyarto Perspektif E Ekonomi Islam
Nama	: Imani Mar'atus Sholichah
NIM	: 15913023
Konsentrasi	: Ekonomi Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 28 Juli 2017
Pembimbing,

Dr. Yusdani, M.Ag

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

MOTTO

Adil adalah menimbang yang sama berat,
menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar,
mengembalikan hak yang empunya dan
jangan berlaku dzalim diatasnya
(Hamka[1])

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

[1]Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1997).

ABSTRAK

KONSEP EKONOMI KERAKYATAN MUBYARTO PERSPEKTIF ETIKA EKONOMI ISLAM

Innani Mar'atus Sholichah

NIM. 15913023

Sistem ekonomi kerakyatan bertujuan menginginkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan isi Pancasila. Keadilan merupakan salah satu aksioma dalam etika ekonomi Islam, sehingga mempunyai peluang untuk dilakukan dialog dalam rangka elaborasi pengembangan keilmuan ekonomi di Indonesia. Mubyarto adalah salah satu tokoh yang mengusung ekonomi kerakyatan di Indonesia dengan mengembangkan pemikiran bahwa ekonomi Indonesia mempunyai sistem dan moral khas dan bisa dikenali. Sifat-sifat sistem dan moral ekonomi Indonesia memang telah melandas perilaku perorangan, kelompok dalam masyarakat, pengusaha, dai negara.

Tujuan penelitian ini untuk menjawab permasalahan terkait konstruksi konsep ekonomi kerakyatan yang ditawarkan Mubyarto dalam perspektif etika dan kontribusi terhadap pembangunan keadilan ekonomi daerah di Indonesia. Teori dasar etika ekonomi Islam dan ekonomi kerakyatan mulai dari pengertian, ciri, hingga peran negara yang digunakan.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa sistem ekonomi yang digagas oleh Mubyarto mengutamakan pembangunan aktivitas ekonomi yang berkeadilan dan moral yang baik, termasuk aktivitas ekonomi oleh perorangan dan kelompok masyarakat luas. Gagasan ekonomi kerakyatan mempunyai hubungan dengan ekonomi Islam karena gagasan Mubyarto bersumber pada GBHN Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang tertuang nilai-nilai Islam. Kontribusi yang diberikan cukup memberi bukti bahwa ekonomi Pancasila diperjuangkan hingga sekarang.

Kata Kunci: *Ekonomi Kerakyatan, Etika Ekonomi Islam, Keadilan, Mubyarto.*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ABSTRACT
CONCEPT OF PEOPLE'S ECONOMY OF MUBRYARTO IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC ECONOMIC ETHICS

Innani Mar'atus Sholichah
NIM. 15913023

People's economy system in its objective certainly wants the existence of social justice for all Indonesia people in accordance with the content of Pancasila. Justice is one of axioms in the ethics of Islamic economy. Thus, it has a very large opportunity for the further linkage or dialogue and discussion for the elaboration of the development of economics in Indonesia. Mubyarto is one of figures carries the people's economy in Indonesia. He developed a concept that people's economy has certain system and moral that can be identified. The characteristics of the system and moral of Indonesia economy has become the base of a variety of behaviours of individual, group in society, entrepreneur, government and State.

This research is to answer a problem related to the construction of the people's economy concept offered by Mubyarto in the ethical perspective and its contribution to the development of the local economic justice in Indonesia. Using the basic theory of Islamic economy and people's economy started from its definition, characteristics to State role.

The result of this research showed that the economic system offered by Mubyarto has a justice and prioritizes the human development in the economic system. The concept of the people's economy has a correlation with the Islamic economy as the concept of Mubyarto is stated in the Islamic values such as Tauhid or Divinity that is always in the first and the value of economic justice upheld in his concept. The contribution given sufficiently has proven that Pancasila economy needs to be struggled up to today.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Keywords: *People's Economy, Ethics of Islamic Economy, Justice, Mubyarto*

July 26, 2017

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	*b*	-
ت	Tā	*t*	-
ث	Sā	*ś*	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	*j*	-
ح	Hā'	*ḥa'*	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	*kh*	-
د	Dāl	*d*	-
ذ	Zāl	*ż*	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	*r*	-
ز	Zā'	*z*	-
س	Sīn	*s*	-
ش	Syīn	*sy*	-
ص	Sād	*ṣ*	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	*ḍ*	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	*ṭ*	t (dengan titik di bawah)

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ظ	Zā'	*ẓ*	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	*G*	-
ف	Fā'	*F*	-
ق	Qāf	*Q*	-
ك	Kāf	*K*	-
ل	Lām	*L*	-
م	Mīm	*m*	-
ن	Nūn	*n*	-
و	Wāwu	*w*	-
ه	Hā'	*h*	-
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	*y*	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	*muta'addidah*
عدة	Ditulis	*'iddah*

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	*ḥikmah*
جزية	Ditulis	*jizyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	*karāmah al-auliyā'*

c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	*zakāt al-fi□tr*

IV. Vokal Pendek

-◌́-------	*faṭḥah*	ditulis	a
-◌̣-------	*Kasrah*	ditulis	i
-------◌́-	*ḍammah*	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	*Faṭḥah* + *alif* جاهلية	ditulis ditulis	*ā* *jāhiliyah*
2.	*Faṭḥah* + *ya'* mati تنسى	ditulis ditulis	*ā* *tansā*
3.	*Kasrah* + *ya* mati كريم	ditulis ditulis	*ī* *karīm*
4.	*ḍammah* + *wawu* mati فروض	ditulis ditulis	*ū* *furūḍ*

VI. Vokal Rangkap

1.	*Faṭḥah* + *ya'* mati بينكم	ditulis ditulis	*ai* *bainakum*
2.	*Faṭḥah* + *wawu* mati قول	ditulis ditulis	*au* *qaul*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	*a'antum*
أعدت	Ditulis	*u'iddat*
لئن شكرتم	Ditulis	*la'in syakartum*

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	*al-Qur'ān*
القياس	Ditulis	*al-Qiyās*

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	Ditulis	*as-Samā'*
الشمس	Ditulis	*asy-Syams*

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	*zawi al-furūd*
أهل السنة	Ditulis	*ahl as-Sunnah*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
الحَمْدُ اللهِ رَبِّ العَالَمِيْنِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الأَنْبِيَاءِ وَالمُرْسَلِيْنِ
سَيِّدُنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنِ أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT Sang Penguasa alam semesta. Semoga *salawat* dan keselamatan selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW serta keluarga dan sahabatnya. Atas segala rahmat dan hidayah-Nya, tesis ini dapat selesai. Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian dari persyaratan guna memperoleh gelar Magister Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta dengan harapan dapat memberikan kontribusi secara keilmuan kepada pihak yang berkepentingan.

Banyak pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini. Pada kesempatan ini, peneliti menyampaikan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Nandang Sutrisno, SH., M.Hum., LLM. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta,
2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. Hujair AH. Sanaky, MSI. selaku Ketua Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Yusdani, M.Ag. selaku Sekretaris Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta dan juga selaku dosen pemimbing. Terimakasih telah memberikan arahan, semangat, motivasi dan saran akademik untuk penyusunan tesis ini. Terimakasih atas

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

kearifan dan empati yang sangat dalam bagi terciptanya ruang longgar ekspresi peneliti selama penyusunan tesis.

5. Kepada segenap dosen Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, atas kuliah-kuliah yang telah menumbuhkan ruang bagi kesadaran intelektual.
6. Kepada para staff dan karyawan Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, atas bantuan administratifnya selama penyusunan tesis.
7. Kepada Sang Pangeranku, yang selalu menjadi penyejuk hati, terimakasih atas warna baru yang melengkapi kehidupan ini.
8. Kepada Keluarga Besar Bani Suparno, termasuk yang tercinta Mommy, Bapak, Mbak Iah, Dek Izzah dan Dek Ahmad, atas makna keluarga yang selalu memberi dukungan lebih nyata dan lebih besar daripada yang lainnya.
9. Keluarga besar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Cabang AR. Fakhruddin Kota Yogyakarta, darah juangku menjadi bagian dari perjuanganmu, Jaya IMM.
10. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Komisariat FAI UMY, benih perjuanganku lahir dari rahimmu.
11. Kepada seluruh teman-teman mahasiswa EI MSI UII 2015/2016, atas nilai kebersamaannya yang tulus.
12. Kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses perkuliahan hingga penyelesaian tesis ini, sampai akhirnya aku menjadi mahasiswa yang selesai.

Kritik dan saran yang membangun dari kesempurnaan tesis ini peneliti terima dengan senang hati. Demikian terima kasih.

Yogyakarta, 28 Juli 2017
Peneliti,



Innani Mar'atus Sholichah

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**
HALAMAN TIM PENGUJI ..... **iv**
HALAMAN NOTA DINAS ..... **v**
PERSETUJUAN ..... **vi**
MOTTO ..... **vii**
ABSTRAK INDONESIA ..... **viii**
ABSTRAK INGGRIS ..... **ix**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **xi**
KATA PENGANTAR ..... **xv**
DAFTAR ISI ..... **xvii**
DAFTAR TABEL ..... **xix**
DAFTAR GAMBAR ..... **xx**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xxi**

BAB I : PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian 5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 5
D. Sistematika Pembahasan 6

BAB II : KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI **8**
A. Kajian Penelitian Terdahulu 8
B. Kerangka Teori 31
1. Pengertian dan Prinsip Ekonomi Kerakyatan. 31
2. Sejarah Ekonomi Kerakyatan di Indonesia ... 32
3. Fungsi Negara dalam Ekonomi Kerakyatan .. 35
4. Model Kajian Tokoh 36
5. Etika Ekonomi Islam 41

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB III : METODE PENELITIAN 48
A. Jenis Penelitian 48
B. Sumber Referensi 48
C. Pendekatan 50
D. Teknik Analisis Data 51

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .. 54
A. Hasil Penelitian 54
1. Biografi Mubyarto 54
2. Pendidikan dan Karir Mubyarto 55
3. Karya Mubyarto 58
B. Konsep Ekonomi Kerakyatan Mubyarto 61
1. Sistem Ekonomi Kerakyatan Mubyarto 63
2. Etika dan Moral Ekonomi Kerakyatan Mubyarto 74
3. Implementasi Ekonomi Kerakyatan Mubyarto 77
C. Pembahasan 83
1. Ekonomi Kerakyatan Mubyarto Perspektif Etika Ekonomi Islam 83
2. Kontribusi Ekonomi Kerakyatan Mubyarto terhadap Pembangunan Keadilan Ekonomi Daerah di Indonesia 89
D. Preskripsi dan Refleksi Kritis 95

BAB V : PENUTUP 97
A. Kesimpulan 97
B. Rekomendasi 98

DAFTAR PUSTAKA 99
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu *15*
Tabel 2. Karya Mubyarto *59*
Tabel 3. Ekstrak Bahasan Ekonomi Kerakyatan Mubyarto *80*

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Komponen-Komponen Analisis Data Model Interaktif..... *51*

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR LAMPIRAN

Surat Pengantar Wawancara PUSTEP UGM
Surat Pengantar Wawancara Prof. Edy Suandi Hamid
Hasil Wawancara PUSTEP dan Prof Edy Suandi Hamid

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB I
PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini mengungkapkan masalah terkait keterkungkungan pengembangan keilmuan ekonomi Islam dalam tiga aliran, yaitu; Baqr al-Sadr, *mainstream* dan kritis. Selain itu, masalah terkait pengembangan keilmuan ekonomi Islam dengan sistem ekonomi yang sedang digunakan di Indonesia. Penelitian ini mengambil sistem ekonomi kerakyatan Mubyarto yang menjadi salah satu sistem ekonomi alternatif di Indonesia akan dibahas dalam bentuk latar belakang, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan akan dibahas alur penelitiannya melalui sistematika pembahasan.

A. Latar Belakang Masalah

Islam yang sejak abad pertengahan telah memberikan kontribusi dan sumbangsih pemikiran yang luar biasa terhadap teori ekonomi modern, kini kembali dengan kekuatan baru dan sebuah spirit modern berdasarkan prinsip – prinsip Islam. Ekonomi Islam bisa jadi menjadi pintu utama menuju peradaban Islam kedua yang menjadikan Islam sebagai lokomotif peradaban dunia berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan kebersamaan serta pemerataan.

Paradigma baru ini dapat lebih diterima oleh masyarakat melalui berbagai pembuktian empirik yang diciptakan dari tangan para akademisi, bankir dan para professional lainnya yang senantiasa dikawal oleh para alim – ulama dan fuqaha yang memahami berbagai masalah agama. Materi kajian dan diskursus ekonomi Islam sampai pada pencarian format baru dalam sistem keuangan Islam, pembentukan berbagai infrastruktur perbankan Islam, metode perhitungan, dan penarikan zakat yang tepat untuk seluruh kategori pembayar zakat, model pembelanjaan secara Islam dan sebagainya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Perkembangan pemikiran ekonomi Islam selama ini sangat menonjolkan tiga aliran pemikiran, yaitu aliran Baqr as-Sadr, aliran *mainstream* dan aliran kritis. Ketiga aliran tersebut menjadi corak pemikiran yang digunakan oleh seluruh akademika dan para ekonom Islam di seluruh dunia hingga sekarang. Hal tersebut membuat semacam keterkungkungan dalam sejarah perkembangan pemikiran ekonomi Islam. Seolah-olah perkembangan pemikiran ekonomi Islam tidak bisa keluar dari ketiga corak pemikiran tersebut.

Setiap negara mempunyai sistem ekonominya sendiri-sendiri. Sistem ekonomi merupakan segenap aturan main yang digunakan dalam menjalankan kegiatan perekonomiannya. Sistem perekonomian dibagi menjadi empat, yaitu; tradisional, terpusat, liberal, pasar dan campuran. Sedangkan negara Indonesia menggunakan sistem ekonomi pasar, yaitu sistem perekonomian yang dijalankan atas dasar mekanisme pasar.

Ekonomi Islam mulai berkembang di Indonesia pada akhir abad ke-19 dengan bukti kongkrit yang dapat menunjukkan perkembangan awal ekonomi Islam adalah dengan berdirinya bank Muammalat Indonesia. Berkembangnya ekonomi Islam menjadi alternatif baru dalam menghadapi tantangan ekonomi di Indonesia, salah satu kasusnya adalah krisis moneter.

Berdasarkan sejarah berkembangnya ekonomi Islam di Indonesia, pemikir ekonomi Indonesia seharusnya mampu melakukan pengembangan pemikiran yang menghubungkan antara sistem ekonomi yang sedang berjalan di Indonesia dengan ekonomi alternatif, seperti ekonomi Islam. Tidak bisakah ekonomi Islam dipertautkan dengan sistem ekonomi yang sedang berjalan di Indonesia ini. Karena dari pertautan tersebut bisa melahirkan sebuah solusi untuk permasalahan ekonomi di Indonesia. Termasuk tidak bisakah dipertautkan dengan sistem ekonomi kerakyatan yang pernah berjalan pada masa Orde Baru tersebut.

Sistem ekonomi kerakyatan dalam tujuannya jelas mengingkinkan adanya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Indonesia sesuai dengan isi Pancasila, sedangkan keadilan merupakan salah satu aksioma dalam etika ekonomi Islam, sehingga dengan begitu sangat besar peluang untuk dilakukannya pertautan atau dialog dan diskusi lebih lanjut dalam rangka elaborasi pengembangan keilmuan ekonomi di Indonesia.

Sebagai sebuah sistem, ekonomi Islam di Indonesia mempunyai pengaruh yang besar dalam pembentukan ekonomi yang dibangun atas nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila. Kontribusi ini berpengaruh besar dalam membentuk ekonomi kerakyatan di Indonesia yang merupakan salah satu dari wacana demokratisasi ekonomi yang tertuang dalam pasal 33 UUD 1945. Pasal yang dirumuskan oleh Moh. Hatta ini mencantumkan tujuan akhir sistem kemakmuran rakyat secara maksimal.

Perekonomian harus disusun berdasar demokrasi ekonomi, dimana kemakmuran masyarakat lebih diutamakan daripada kemakmuran perorangan. Mubyarto adalah salah satu tokoh yang mengusung ekonomi kerakyatan di Indonesia, selain Moh Hatta, Sri Edi Swasono, Emil Salim, dan tokoh lainnya. Beliau yang memperkenalkan gagasan ekonomi Pancasila pada tahun 1979. Mubyarto menyatakan bila kemakmuran perseorangan yang justru diutamakan, maka tampuk produksi akan jatuh ke tangan perorangan yang berkuasa, dan jika benar terjadi maka rakyat akan tertindas.

Mubyarto mendefinisikan ekonomi kerakyatan sebagai sistem ekonomi (demokrasi) yang dioperasionalkan melalui pemihakan dan perlindungan penuh pada sektor ekonomi rakyat (kecil). Sejalan dengan ini pula Mubyarto mendasarkan ekonomi kerakyatan pada sila ke-4 dari Pancasila dengan ciri-ciri antara lain; dilakukan oleh rakyat tanpa modal besar, dikelola dengan cara-cara swadaya, bersifat mandiri, tidak ada buruh, tidak ada majikan dan tidak mengejar keuntungan.

Mubyarto mengembangkan pemikiran bahwa ekonomi Indonesia mempunyai sistem dan moral tersendiri yang bisa

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

dikenali. Sifat – sifat sistem dan moral ekonomi Indonesia memang telah melandasi aneka perilaku perorangan, kelompok dalam masyarakat, pengusaha, pemerintah dan Negara. Sistem dan moral yang dimaksud bersumber dari Pancasila, yang dari kelima silanya menggambarkan secara utuh semangat kekeluargaan (gotong royong) dalam upaya mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Mubyarto menambahkan bahwa ilmu ekonomi di mata Bung Hatta termasuk ilmu moral dan kemanusiaan[1]. Dan moral yang dimaksud bersumber pada ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Kelima sila dalam Pancasila menggambarkan secara utuh semangat kekeluargaan (gotong royong) dalam upaya mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat dan masyarakat Indonesia[2].

Terlihat bahwa Mubyarto mempunyai konsep tentang bagaimana menegakkan dan menciptakan suatu masyarakat yang baik dan sejahtera yang dituangkan dalam gagasannya yaitu ekonomi pancasila, yang pemikiran tersebut sejalan dengan etika ekonomi Islam dengan salah satu aksioma etika yang berupa keadilan.

Etika dalam perkembangannya sangat memengaruhi kehidupan manusia, karena etika memberi manusia orientasi bagaimana ia menjalani hidupnya melalui rangkaian tindakan sehari-hari. Itu berarti etika membantu manusia untuk mengambil sikap dan bertindak secara tepat dalam menjalani hidup ini. Etika pada akhirnya membantu kita untuk mengambil keputusan tentang tindakan apa yang perlu kita lakukan dan yang perlu kita pahami bersama.

Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu adanya penelitian untuk menelaah lebih jauh terkait keserasian etika ekonomi Islam yang terdapat dalam pemikiran ekonomi rakyat Mubyarto.

---

[1]Mubyarto, *Ekonomi Rakyat dan Program IDT*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1996), hlm. 12.

[2]Mubyarto, *Ekonomi Pancasila: Lintasan Pemikiran Mubyarto*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1997), hlm. 186.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Kemudian ditelaah dengan keselarasan pemikiran etika ekonomi Mubyarto dalam pembangunan kedilan ekonomi daerah di Indonesia. Sehingga penelitian ini diberi judul *"Konsep Ekonomi Kerakyatan Mubyarto dalam perspektif Etika Ekonomi Islam."*

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Fokus Penelitian

   Penelitian ini berfokus pada:

   a. Pemikiran ekonomi kerakyatan Mubyarto dari perspektif etika ekonomi Islam
   b. Kontribusi ekonomi kerakyatan Mubyarto terhadap pembangunan keadilan ekonomi daerah di Indonesia
2. Pertanyaan Penelitian
   a. Bagaimana konstruksi ekonomi kerakyatan yang ditawarkan Mubyarto dalam perspektif etika ekonomi Islam?
   b. Bagaimana kontribusi ekonomi kerakyatan Mubyarto terhadap pembangunan keadilan ekonomi daerah di Indonesia?

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
   a. Menganalisis gagasan ekonomi kerakyatan Mubyarto dan tinjauannya dalam perspektif etika ekonomi Islam
   b. Menganalisis kontribusi ekonomi kerakyatan Mubyarto terhadap pembangunan keadilan ekonomi daerah di Indonesia
2. Manfaat Penelitian
   a. Manfaat Teoritis
      1) Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu ekonomi Islam, khususnya pembangunan keadilan ekonomi daerah di Indonesia

2) Memberikan kontribusi bagi khazanah pembaharuan ekonomi Islam pada masa sekarang

b. Manfaat Praktis

1) Bagi lembaga/institusi, sebagai sarana untuk memperluas wawasan keilmuan dan meningkatkan profesionalitasnya terkait etika dalam pembangunan ekonomi, khususnya daerah di Indonesia
2) Bagi peneliti, diharapkan karya ini dapat menjadi sarana belajar dalam menyusun karya ilmiah dan melakukan kajian yang lebih mendalam terkait tokoh maupun tema yang diambil dalam penelitian ini.

D. Sistematika Pembahasan

Peneliti menggunakan pokok bahasan secara sistematis yang terdiri dari lima bab dan pada tiap bab-bab terdiri dari sub-sub sebagai perinciannya. Hal ini untuk mendapatkan pembahasan yang utuh, runtut, dan mudah dipahami penjabarannya. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab Pertama, bab ini merupakan pengantar dari pembahasan penelitian ini yang berisi: pertama, latar belakang masalah yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah yang diteliti. Kedua, fokus dan pertanyaan penelitian merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. Ketiga, berisikan tujuan dan manfaat yang akan diharapkan tercapainya dalam penelitian ini. Terakhir adalah mengenai sistematika pembahasan sebagai upaya yang mensistematiskan penyusunan.

Bab Kedua, bab ini menjelaskan tentang pertama, kajian penelitian terdahulu sebagai penelusuran terhadap literatur yang telah ada sebelumnya dan kaitannya terhadap obyek penelitian. Kedua, kerangka teoritik menyangkut pola fikir atau kerangka berfikir yang digunakan dalam memecahkan masalah.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bab Ketiga, dalam bab ini menjelaskan terkait metode penelitian yang berupa penjelasan langkah-langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisis data.

Bab Keempat, bab ini dijelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan, yang dalam hal ini penyusun membahas mengenai Mubyarto yang meliputi biografi dan faktor yang mempengaruhi pemikirannya, aktivitas keilmuannya dan konsep mengenai ekonomi kerakyatan. Hal ini dimaksudkan untuk memahami secara utuh pemikiran tokoh tersebut. Selanjutnya membahas terkait keserasian etika ekonomi dalam pemikiran ekonomi kerakyatan Mubyarto dengan etika ekonomi dalam Islam, kemudian dikaji terkait implementasinya terhadap pembangunan keadilan ekonomi daerah di Indonesia.

Bab Kelima, bab ini merupakan bab terakhir dari keseluruhan rangkaian pembahasan, memaparkan kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi dari peneliti berkenaan dengan pengembangan keilmuan dan yang ada hubungannya dengan masalah etika ekonomi Islam agar dapat mencapai hal-hal yang lebih baik dan lebih maju.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB II
KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

Bab ini terdapat lima belas penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Walaupun berkaitan dalam beberapa hal juga mempunyai perbedaan bahasan dengan penelitian ini, baik dari segi rumusan masalah yaitu dari konsep ekonomi kerakyatan Mubyarto dianalisis terkait sudut pandang etika ekonomi Islam dalam melihat konsep ekonomi kerakyatan Mubyarto, terutama dalam cabang etika keadilan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ekonomi kerakyatan, etika ekonomi Islam, fungsi Negara, dan model kajian tokoh, yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian ini berguna untuk menunjang keaslian dari penelitian. Penelitian terdahulu terdapat penelitian tentang Mubyarto yang membicarakan ekonomi, terdapat pula penelitian tentang perspektif ekonomi Islam dan keadilan ekonomi. Peneliti bukanlah orang yang pertama meneliti tentang teori ekonomi kerakyatan secara umum dan terutama teori ekonomi Mubyarto secara khusus. Sudah ada beberapa peneliti sebelumnya yang telah melakukan penelitian tentang tema ekonomi kerakyatan secara umum dan tokoh yang berbeda.

Anwar Abbas[1] dalam disertasinya yang berjudul "Pemikiran Ekonomi Mohammad Hatta Ditinjau dari Perspektif Islam" merumuskan tingkat kesesuaian dan atau paralelitas antara pandangan-pandangan ekonomi Mohammad Hatta dengan pandangan-pandangan yang ada dalam ajaran Islam dan bagaimana pengembangan gagasan baru dan pengkajian

[1]Anwar Abbas, "Pemikiran Ekonomi Mohammad Hatta Ditinjau dari Perspektif Islam", *Disertasi Doktor*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

pandangan dijadikan sebagai varian pemikiran ekonomi Islam. Dengan teori ekonomi Islam, hasil penelitian ini adalah pemikiran ekonomi Mohammad Hatta dilihat dari perspektif ajaran Islam secara substansial sangat sesuai dan sejalan dengan ajaran Islam. Begitu pula Amiur Nuruddin[2] dalam penelitiannya berjudul "Konsep Keadilan dalam Al-Qur'an dan Implikasinya pada Tanggung Jawab Moral" yang merumuskan bagaimana rumusan-rumusan al-Qur'an tentang keadilan dan implikasinya terhadap tanggung jawab moral menggunakan teori keadilan dan hari keadilan, menghasilkan kesimpulan yaitu semangat dasar al-Qur'an adalah semangat moral yang signifikan dengan keadilan dan hari keadilan. Keadilan dalam Al-Qur'an mempunyai implikasi terhadap tanggung jawab moral yang meliputi; keadilan hukum, keadilan sosial dan ekonomi, dan keadilan dalam hubungan antar golongan.

Penelitian lain dengan judul "Reformasi Kebijakan bagi Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia (Analisis Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam)" oleh Euis Amalia[3] pada 2008 sebagai bahan Disertasi yang merumuskan cara mengembangkan kebijakan dalam rangka penguatan peran LKM dan UKM di Indonesia dari sudut pandang keadilan distributif ekonomi Islam dengan menggunakan teori prinsip ekonomi Islam dan ekonomi distributif yang menghasilkan kesimpulan yaitu Usaha kecil mikro terbukti telah memberikan kontribusi yang besar bagi ekonomi Indonesia. Akan tetapi kontribusinya yang luar biasa tersebut tidak diikuti dengan adanya kebijakan yang responsif terutama untuk kemudahan dalam hal akses permodalan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[2]Amiur Nuruddin, "Konsep Keadilan dalam Al-Qur'an dan Implikasinya pada Tanggung Jawab Moral", *Disertasi Doktor*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 1994.

[3]Euis Amalia, "Reformasi Kebijakan bagi Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia (Analisis Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam)", *Disertasi Doktor*, 2008.

Selain fasilitasi dari pemerintah, pemikiran ekonomi Islam telah memberikan tawaran berupa implementasi instrumen zakat sebagai alat untuk redistribusi pendapatan dan sistem transaksi *syari'ah* yang terbebas dari aspek riba, gharar dan maysir sebagai mekanisme operasional dalam program kemitraan keuangan mikro *syari'ah* untuk memperkuat usaha kecil mikro di Indonesia.

Ruslan Abdul Ghofur Noor[4] dalam penelitiannya yang berjudul "Kebijakan distribusi Ekonomi Islam dalam Membangun Keadilan Ekonomi Indonesia" yang merumuskan masalah yaitu cara mengembangkan kebijakan distribusi dalam ekonomi Islam untuk membangun keadilan ekonomi Indonesia dengan cara menawarkan penyelesaian permasalahan distribusi dalam ekonomi Indonesia, khususnya pada kebijakan distribusi serta peran institusi distribusi dalam perekonomian.

Teori yang digunakan adalah teori kebijakan distribusi dalam ekonomi Islam. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan yaitu kebijakan distribusi yang ditawarkan ekonomi Islam dengan tidak berpihak hanya pada salah satu agen ekonomi, dan diperkuat dengan prinsip-prinsip yang jelas memberikan arahan bahwa keadilan ekonomi harus ditegakkan. Namun menciptakan keadilan ekonomi akan sulit terwujud jika tidak melibatkan peran institusi yang ada seperti halnya pemerintah dan masyarakat.

Penelitian Sofyan Rizal[5] yang berjudul "Titik Temu dan Sinergi Ekonomi Islam dan Ekonomi Kerakyatan" merumuskan masalah yaitu bagaimana konsep ekonomi kerakyatan dalam perspektif ekonomi *syari'ah*. Teori yang digunakan adalah teori ekonomi Islam dan ekonomi kerakyatan. Hasil dari penelitian ini adalah ekonomi Islam dan ekonomi kerakyatan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[4]Ruslan Abdul Ghofur Noor, "Kebijakan distribusi Ekonomi Islam dalam Membangun Keadilan Ekonomi Indonesia", *Jurnal Islamica*, Vol. 6 No. 2, Bulan Maret 2012.

[5]Sofyan Rizal, "Titik temu dan Sinergi Ekonomi Islam dan Ekonomi Kerakyatan", *Jurnal Al Iqtisadi*, Vol III No. 1, Bulan Januari 2011.

sesungguhnya mempunyai tujuan yang sama yaitu kesejahteraan dan keadilan dalam ekonomi bagi semua orang.

Keadilan dan kesejahteran dalam kehidupan ekonomi tersebut dalam Islam harus berlandaskan pada norma dan etika Islam, sehingga semua sistem ekonomi tersebut berjalan sesuai dengan *syari'ah* Islam. Selain merupakan konsep yang berlandaskan pada keadilan sosial dan pemerataan ekonomi yang adil, sesungguhnya ekonomi kerakyatan di Indonesia sudah berjalan sejak lama dengan institusi yang sudah dirancang yaitu koperasi. Institusi koperasi pada tataran konsep dan pelaksanaannya banyak memiliki kesesuaian dengan institusi pemberdayaan ekonomi yang diharapkan Islam.

Ery Wibowo Agung Santosa[6] dalam penelitiannya yang berjudul "Ekonomi Islam dalam Konteks Ke-Indonesia-an (Perspektif Jalan Ketiga)" merumuskan masalah yaitu bagaimana konsep ekonomi Islam dalam konteks ke-Indonesia-an dan menggunakan teori ekonomi Islam dan ekonomi Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa konsep-konsep ekonomi yang pernah digagas oleh para *founding father* di Indonesia misalnya tentang ekonomi koperasi dapat dikatakan sebagai metamorfosis ekonomi Islam dalam konteks ke-Indonesia-an.

Dibentuknya koperasi-koperasi primer yang berbasis sektor riil pertanian maupun perdagangan merupakan bentuk mekanisme pertahanan untuk memerangi riba seperti *gharar* atau spekulasi, monopoli yang merugikan dan bentuk-bentuk riba yang lain. Konsep dan gagasan ini sesungguhnya equal dengan konsep dan gagasan ekonomi Islam.

Hastangka[7] memperkuat dalam penelitiannya yang berjudul "Filsafat Ekonomi Pancasila Mubyarto" merumuskan masalah

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[6]Ery Wibowo Agung Santosa, "Ekonomi Islam dalam Konteks Ke-Indonesia-an (Perspektif Jalan Ketiga), *Jurnal UNIMUS*, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Semarang.

[7]Hastangka, "Filsafat Ekonomi Pancasila Mubyarto", *Jurnal Filsafat*, Vol 22, No. 1, Fakultas Filsafat Universitas Gajah Mada Yogyakarta, bulan April, 2012.

yaitu bagaimana filsafat ekonomi Pancasila yang digagas oleh Mubyarto dan menggunakan teori ekonomi Pancasila, teori pertumbuhan, dan filsafat. Hasil dalam penelitian ini adalah bahwa moral perilaku berekenomi manusia Indonesia yang dijelaskan Mubyarto berpijak pada nilai-nilai Pancasila yaitu berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan. Ekonomi Pancasila Mubyarto merupakan suatu pendekatan dalam melihat perilaku para pelaku ekonomi di Indonesia.

Penelitian Izza Mafruhah[8] yang berjudul "Membumikan Konsep *Syari'ah* dalam Ekonomi Berbasis Kerakyatan (Baitul Maal Wat Tamwil Sebagai Sebuah Solusi)" merumuskan masalah yaitu bagaimana konsep *syari'ah* dalam ekonomi kerakyatan yang salah satu bukti kongkritnya adalah BMT dan menggunakan teori prinsip ekonomi Islam dan prinsip serta produk bank *syari'ah*. Hasil penelitian ini adalah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu bentuk komitmen dari bank Islam dengan menggunakan sistem ekonomi kerakyatan.

Banyak terdapat kendala dan hambatan yang dihadapi BMT dalam perkembangannya. Oleh karena itu butuh sikap *istiqomah* dan professional dalam menjalankan usahanya, sehingga tujuan utama BMT dan perbankan *syari'ah* pada umumnya yaitu menumbuhkan ekonomi Islam berbasis kerakyatan guna mewujudkan masyarakat yang *Baldatun Thayibatun Wa Rabbun Ghofur* dapat terwujud.

Abdul Salam[9] dalam penelitiannya yang berjudul "Interrelasi antara Etika dan Sistem Ekonomi: Studi Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun" menggunakan rumusan masalah yaitu hubungan antara etika dan sistem ekonomi dalam pemikiran ekonomi Ibnu

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[8]Izza Mafruhah, "Membumikan Konsep *Syari'ah* dalam Ekonomi Berbasis Kerakyatan (Baitul Maal Wat Tamwil Sebagai Sebuah Solusi)", *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 3, No. 2, Desember, 2002, hlm. 195-205.

[9]Abdul Salam, "Interrelasi antara Etika dan Sistem Ekonomi", *JESI (Jurnal Ekonomi Syari'ah Indonesia)*, Vol I, No. 2, Bulan Desember, 2011, hlm. 31-44.

Khaldun dan teori yang digunakan etika dan sistem ekonomi. Hasil penelitian ini adalah Ibnu Khaldun menempatkan *syari'ah* sebagai sumber etika yang harus ditegakkan oleh sang pemegang kedaulatan dalam usahanya menegakkan keadilan di tengah-tengah aktivitas ekonomi rakyatnya yang terus mengalami perubahan dan perkembangan.

Konsep ekonomi Ibnu Khaldun menyiratkan sebuah sistem ekonomi yang menuntut bekerjanya lima komponen, yaitu *syari'ah*, pemerintah, rakyat, harta, aktivitas ekonomi, dan keadilan dalam satu kesatuan. Dari sinilah terjalin suatu interrelasi antara *syari'ah* sebagai sumber etika dalam Islam dengan suatu sistem ekonomi dimana syari'at menjadi landasan keadilan bagi sistem ekonomi yang ada pada suatu komunitas atau peradaban, sementara sistem ekonomi yang ada dengan komunitas atau peradaban yang melingkupinya yang menjadi sarana sekaligus wadah yang efektif bagi tegaknya *syari'ah* Islam.

Sama halnya Ahmad Dimyati[10] dalam penelitiannya yang berjudul "Ekonomi Etis; Paradigma Baru Ekonomi Islam" dengan rumusan masalah yaitu bagaimana konsep ekonomi etis itu dan bagaimana pula kerangka epistemologisnya, dan teori yang digunakan adalah etika. Hasil penelitian ini adalah bahwa Ekonomi etis adalah paradigma baru bagi ekonomi Islam dengan proses pembacaannya ekonomi etis melepaskan diri dari jeratan bias-bias ideologis, serta cara-cara interpretasi teologis.

Ekonomi etis dirancang untuk merumuskan standar etika bagi sebuah sistem ekonomi yang berlaku secara universal. Perumusan kerangka metodologis ekonomi etis dimulai dengan pembongkaran mitos teks-teks liturgis yang dicirikan oleh model-model pembacaan teologis kemudian menggantinya dengan pembacaan kritis yang menempatkan teks-teks tersebut sebagai sebuah teks historis dimana kemunculannya sangat

[10]A. Dimyati, "Ekonomi Etis; Paradigma Baru Ekonomi Islam", *Jurnal La-Riba*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol I, No. 2, Bulan Desember, 2007.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang melatar belakanginya.

Syauqi Mubarok[11] dalam penelitiannya yang berjudul "Implementasi Demokrasi Ekonomi dalam Ekonomi *Syari'ah*" merumuskan masalah yaitu bagaimana implementasi konsep demokrasi ekonomi dalam ekonomi *syari'ah* dan menggunakan teori ekonomi Islam dan kemanusiaan. Hasil penelitian menyatakan bahwa perkembangan hukum ekonomi berbasis *syari'ah* belum terwadahi dalam perangkat hukum ekonomi Indonesia. Hal ini dikarenakan hukum ekonomi Indonesia selalu bertitik tolak dari hukum perdata dan hukum dagang yang tercatat adalah hukum Barat dengan sistem hukum Barat membawa kepada sistem ekonomi yang bercorak liberal.

Begitu pula Noer Soetrisno[12] dalam penelitiannya yang berjudul "Etika sebagai Landasan Moral Pengembangan Kelembagaan Ekonomi". Rumusan masalahnya yaitu bagaimana peranan etika sebagai landasan moral dalam mengembangkan kelembagaan ekonomi dan menggunakan teori etika serta kelembagaan ekonomi. Hasil dari penelitian tersebut adalah Penggalian nilai etik dan moral untuk pengembangan kelembagaan ekonomi pada akhirnya ditentukan oleh tahapan kemajuan suatu masyarakat. Tetapi yang lebih mendasar adalah landasan etik dan moral bagi individu dan penyelenggara negara.

Begitupun Zakiyuddin[13] dalam penelitiannya yang berjudul "Konsep Keadilan Ekonomi dalam Al-Qur'an". Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep Al-Qur'an terkait keadilan ekonomi dan menggunakan teori keadilan. Hasil dalam penelitian ini yaitu prinsip keadilan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[11]Syauqi Mubarok Seff, "Implementasi Demokrasi Ekonomi dalam Ekonomi *Syari'ah*", *Jurnal Harmoni*, Edisi Bulan Januari-Maret 2010, hlm. 210-223.

[12]Noer Soetrisno, "Etika sebagai Landasan Moral Pengembangan Kelembagaan Ekonomi", *Jurnal UNISIA*, No. 54/XXVII/IV/2004, Jurnal UII, Yogyakarta, 2004, hlm. 333-342.

[13]Zakiyuddin, "Konsep keadilan ekonomi dalam Al-Qur'an", *Disertasi*, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2006.

ekonomi, prinsip kepemilikan, prinsip produksi, prinsip konsumsi, prinsip distribusi dan peran negara. Tujuan penerapan prinsip keadilan adalah untuk mencapai kesejahteraan.

Selanjutnya oleh Murasa Sarkaniputra[14] dengan penelitiannya yang berjudul "Pembangunan Pertanian Berbasis Kecerdasan Masyarakat" dengan hasil penelitiannya yaitu membangun manusia Indonesia seutuhnya adalah membangun akal budi/*human mind* di setiap warga bangsa. manusia Indonesia tumbuh dengan mengikuti DNA yang didasarkan pada pertimbangan nilai agama dimana *human mind* hidup.

Ditambah lagi dari Rahmatina Kasri, Habib Ahmed[15], dengan penelitiannya yang berjudul "*Assesing Socio-Economic Development based on Maqasid al-Syari'ah Principles: Normative Frameworks, Methods and Implementation in Indonesia*". Hasil dari penelitian ini yaitu *Zakat institutions have the expected positive contribution in reducing poverty amongst the poor, it also provides a workable example of how Maqasid al-Syari'ah principles can be implemented in assessing impacts of socio-economic policies in Muslim societies.*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Thn	Penulis	Judul Pustaka	Kerangka Teori	Hasil
1.	1994	Amiur N	Konsep Keadilan dalam Al-Qur'an dan Implikasinya pada	Keadilan	Semangat dasar al-Qur'an adalah semangat moral yang

[14]Murasa Sarkaniputra, "Pembangunan Pertanian Berbasis Kecerdasan Masyarakat", *Jurnal UNISIA*, No. 54/XXVII/IV/2004, Yogyakarta: UII.

[15]Rahmatina Kasri, Habib Ahmed, "*Assesing Socio-Economic Development based on Maqasid al-Syari'ah Principles: Normative Frameworks, Methods and Implementation in Indonesia*", *Islamic Economic Studies*, Vol. 23, No. 1, Mei 2015, hlm. 73-100.

			Tanggung Jawab Moral		signifikan dengan keadilan dan hari keadilan. Juga keadilan dalam al-Qur'an mempunyai implikasi terhadap tanggung jawab moral yang meliputi; keadilan hukum, keadilan sosial dan ekonomi, dan keadilan dalam hubungan antar golongan.
2.	2002	Izza M	Mebumikan Konsep *Syari'ah* dalam Ekonomi Berbasis Kerakyatan	Ekonomi Islam, Prinsip dan produk bank *syari'ah*	-Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu bentuk

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

			(Baitul Maal Wat Tamwil Sebagai Sebuah Solusi)		komitmen dari bank Islam dengan menggunakan sistem ekonomi kerakyatan. -Banyak terdapat kendala dan hambatan yang dihadapi BMT dalam perkembangannya, oleh karena itu butuh sikap istiqomah dan profesional dalam menjalankan usahanya.
3.	2004	Noer S	Etika sebagai Landasan Moral Pengembangan Kelembagaan Ekonomi	Etika, kelembagaan ekonomi	Penggalian nilal etik dan moral untuk pengembangan lembaga ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

					ditentukan oleh tahapan kemajuan suatu masyarakat. Tetapi yang lebih mendasar adalah landasan etik dan moral bagi individu dan penyelenggara negara.
4.	2004	Murasa S	Pembangunan Pertanian Berbasis Kecerdasan Masyarakat	Pertanian	Membangun manusia Indonesia seutuhnya adalah membangun akal budi/human mind di setiap warga bangsa. manusia Indonesia tumbuh dengan mengikuti

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

					DNA yang didasarkan pada pertimbangan nilai agama dimana human mind hidup.
5.	2006	Zakiyuddin	Konsep Keadilan Ekonomi dalam Al-Qur'an	Keadilan	Prinsip keadilan ekonomi; prinsip kepemilikan, prinsip produksi, prinsip konsumsi, prinsip distribusi dan peran negara. Tujuan penerapan keadilan untuk mencapai kesejahteraan.
6.	2007	Ahmad D	Ekonomi Etis; Paradigma Baru Ekonomi	Etika	Islam Ekonomi etis adalah paradigma baru bagi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

					ekonomi Islam, dimana dalam proses pembacaan nya ekonomi etis melepaskan diri dari jeratan bias-bias ideologis, serta cara-cara interpretasi teologis. Ekonomi etis dirancang untuk merumuskan standar etika bagi sebuah sistem ekonomi yang berlaku secara universal.
7.	2008	Anwar Abbas	Pemikiran Ekonomi	Ekonomi Islam	Pemikiran ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

			Mohammad Hatta Ditinjau dari Perspektif Islam. .		Moh Hatta dilihat dari perspektif ajaran Islam secara substansial sangat sesuai dan sejalan dengan ajaran Islam dan dapat menjadi varian dalam pemikiran ekonomi Islam.
8.	2008	Euis Amalia	Reformasi Kebijakan bagi Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia (Analisis Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam)	Ekonomi Islam. Ekonomi Distributif	-Kontirbusi lembaga mikro yang luar biasa tidak diikuti dengan adanya kebijakan yang responsif terutama untuk kemudahan dalam hal akses permodalan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

					. -Ekonomi Islam telah memberikan tawaran berupa implementasi instrumen zakat sebagai alat untuk redistribusi pendapatan dan sistem transaksi *syari'ah* sebagai mekanisme operasional dalam kemitraan keuangan mikro *syari'ah* untuk memperkuat usaha mikro di Indonesia.
9.	2010	Syauqi M Seff	Implementasi Demokrasi Ekonomi dalam Ekonomi	Ekonomi Islam, kemanusiaan	Perkembangan hukum ekonomi berbasis syari'ah

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

			Syari'ah		belum terwadahi dalam perangkat hukum ekonomi Indonesia. Hal ini dikarenakan hukum ekonomi Indonesia selalu bertitik tolak dari hukum perdata dan hukum dagang yang notabeneny a adalah hukum Barat, dimana sistem hukum Barat membawa kepada sistem ekonomi yang bercorak

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

					"liberal".
10.	2011	Sofyan Rizal	Titik temu dan Sinergi Ekonomi Islam dan Ekonomi Kerakyatan.	Ekonomi Islam, Ekonomi rakyat	-Ekonomi Islam dan ekonomi kerakyatan mempunyai tujuan yang sama, yaitu kesejahteraan dan keadilan dalam ekonomi bagi semua orang. -Ekonomi kerakyatan di Indonesia sudah berjalan sejak lama dengan institusi yang sudah dirancang, yaitu koperasi. - Institusi koperasi pada tataran konsep dan pelaksanaannya banyak memiliki

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

					kesesuaian dengan institusi pemberdayaan ekonomi yang diharapkan Islam
11.	2011	Abdul Salam	Interrelasi antara Etika dan Sistem Ekonomi: Studi Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun	Etika dan sistem ekonomi	Konsep ekonomi Ibnu Khaldun menyiratkan sebuah sistem ekonomi yang menuntut bekerjanya lima komponen, yaitu syari'at, pemerintah, rakyat, harta, aktivitas ekonomi dan keadilan dalam satu kesatuan. Dari sinilah terjalin

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

					suatu interrelasi antara syari'at sebagai sumber etika dalam Islam dengan suatu sistem ekonomi dimana syari'at menjadi landasan keadilan bagi sistem ekonomi yang ada pada suatu komunitas atau peradaban.
12.	2012	Ruslan Abdul Ghofur Noor	Kebijakan distribusi Ekonomi Islam dalam Membangun Keadilan Ekonomi Indonesia	Kebijakan Distribusi Islam	Kebijakan distribusi yang ditawarkan ekonomi Islam dengan tidak berpihak hanya pada salah satu

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

					agen ekonomi, dan diperkuat dengan prinsip-prinsip yang jelas memberikan arahan bahwa keadilan ekonomi harus ditegakkan. Namun menciptakan keadilan ekonomi sulit terwujud jika tidak melibatkan peran institusi yang ada seperti halnya pemerintah dan masyarakat.
13.	2012	Ery Wibowo	Ekonomi Islam dalam Konteks Ke-	Ekonomi Islam, Ekonomi	Konsep-konsep ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

		Agung S	Indonesia-an (Perspektif Jalan Ketiga) .	Indonesia	yang digagas oleh para *founding father* Indonesia misalnya tentang ekonomi koperasi dapat dikatakan sebagai metamorphosis ekonomi Islam dalam konteks keIndonesia-an, contohnya koperasi. Konsep dan gagasan ini sesungguhnya equal dengan konsep dan gagasan ekonomi Islam.
14.	2012	Hastangka	Filsafat Ekonomi Pancasila	Ekonomi Pancasila, Pertumbuh	-Perilaku berekenomi manusia

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

			Mubyarto	an, Filsafat	Indonesia yang dijelaskan Mubyarto berpijak pada nilai-nilai Pancasila yaitu berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan. -Ekonomi Pancasila Mubyarto merupakan suatu pendekatan dalam melihat perilaku para pelaku ekonomi di Indonesia.
15.	2015	Rahmatina Kasri, Habib	*Assesing Socio-Economic Development*	Maqaṣid *Syari'ah*	*Zakat institutions have the expected*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

		Ahmed	*based on Maqaṣid al-Syari'ah Principles: Normative Frameworks, Methods and Implementation in Indonesia*		*positive contribution in reducing poverty amongst the poor, it also provides a workable example of how Maqaṣid al-Syari'ah principles can be implemented in assessing impacts of socio-economic policies in Muslim societies*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Penelitian terdahulu yang dijelaskan dalam deskripsi dan tabel di atas menegaskan bahwa terdapat perbedaan antara penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti yaitu dari segi permasalahan yang diteliti, peneliti mengelaborasi konsep ekonomi kerakyatan dengan mengambil tokoh Mubyarto yang merupakan tokoh Indonesia yang sangat *concern* terhadap ketimpangan ekonomi dalam masyarakat.

Selain dari permasalahan yang mempunyai perbedaan bahasan dengan penelitian sebelumnya, juga dari segi kerangka pemikiran yaitu dari konsep ekonomi kerakyatan Mubyarto

tersebut dianalisis terkait sudut pandang etika ekonomi Islam dalam melihat konsep ekonomi kerakyatan Mubyarto, terutama dalam cabang etika keadilan dan juga kontribusinya dengan pembangunan keadilan ekonomi daerah di Indonesia yang tidak terdapat dalam penelitian-penelitian terdahulu. Berdasarkan telaah pustaka tersebut, peneliti menganggap bahwa penelitian ini memiliki nilai kebaruan dan kontribusi pengetahuan *(contribution to knowledge)* yang cukup signifikan dalam studi ekonomi Islam, dan karenanya secara akademik layak untuk dilakukan.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian dan Prinsip Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi kerakyatan dapat dikatakan sebagai subsistem dari sistem ekonomi pancasila[16]. Secara harfiah, kata rakyat merujuk pada semua orang dalam suatu wilayah atau Negara, maka yang dimaksud dengan ekonomi rakyat adalah ekonomi seluruh rakyat Indonesia. Namun dalam konteks riil yang berkembang, istilah ekonomi rakyat muncul sebagai akibat ketidakpuasan terhadap perekonomian nasional yang bias kepada unit-unit besar.

Ekonomi rakyat sering disebut dengan berbagai istilah lain yang terkait, yaitu perekonomian rakyat atau ekonomi kerakyatan. Ini mengandung makna yang spesifik. Jika ekonomi rakyat menggambarkan tentang pelaku ekonominya, maka perekonomian rakyat lebih menonjol pada obyek atau situasinya. Makna yang lebih luas terdapat dalam ekonomi kerakyatan yang mencerminkan suatu bagian dari sistem perekonomian[17].

---

[16]Edy Suandi Hamid, *Ekonomi Indonesia dari Sentralisasi ke Desentralisasi*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm. 33.

[17]Edy Suandi Hamid, *Sistem Ekonomi,* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2008), hlm. 6.25.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Makna dari ekonomi kerakyatan menurut Hamid dan Hendrianto dalam Edy Suandi Hamid[18] adalah suatu perekonomian yang orientasinya pada keterlibatan orang banyak dalam aktivitas ekonomi, baik aktivitas produksi, konsumsi, maupun distribusi.

Ekonomi rakyat yang dijelaskan oleh Ginandjar Kartasasmita adalah ekonomi yang dilaksanakan sebagian besar rakyat Indonesia. Sehingga dari pernyataan tersebut harapannya seluruh aktivitas-aktivitas di sektor industri, pertanian, pertambangan, jasa-jasa harus melibatkan banyak rakyat untuk melakukannya.

2. Sejarah Ekonomi Kerakyatan Di Indonesia

Ekonomi kerakyatan merupakan terminologi ekonomi yang digunakan Mohammad Hatta pasca kolonialisme Hindia Belanda. Dengan memperhatikan situasi kondisi sosial ekonomi peninggalan pemerintah Hindia Belanda saat itu menempatkan kaum pribumi dalam kelas strata sosial paling bawah. Ekonomi kerakyatan diciptakan sebagai cara untuk menjadikan bangsa pribumi sebagai tuan di negeri sendiri. Konsep ekonomi kerakyatan kemudian dinyatakan dalam konstitusi Republik Indonesia Pasal 33 UUD 1945, yang menjelaskan secara terperinci mengenai (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak (harus) dikuasai oleh negara. (3) Bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[18]Edy Suandi Hamid, *Ekonomi Indonesia dari Sentralisasi ke Desentralisasi*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm. 34.

Selain itu, negara memiliki peran yang sangat besar dalam sistem ekonomi kerakyatan. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34, peran negara dalam sistem ekonomi kerakyatan antara lain meliputi lima hal sebagai berikut: (1) mengembangkan koperasi, (2) mengembangkan BUMN, (3) sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33 ayat 1: memastikan pemanfaatan bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; (4) memenuhi hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, (5) memelihara fakir miskin, dan anak terlantar. Zaman sekarang ekonomi kerakyatan menjadi sebuah wacana yang terus diulang dengan tanpa diketahui pasti anatomi dan struktur pastinya. Semua ekonom baik yang berhaluan sosialis, dan kapitalis akan berusaha untuk menjelaskan dampak ekonomi kepada rakyat.

Waktu dan masa berganti dan tidak satupun yang mampu membuktikan bahwa rakyat, kaum marginal, bisa menikmati hasil kegiatan ekonomi secara adil, dan merata. Sukarno dengan konsep Marhaenismenya telah berusaha untuk membangun model ekonomi kerakyatan Indonesia dengan berpijak pada situasi dan kondisi rakyat Indonesia pada masanya. Soeharto berusaha membangun ekonomi kerakyatan dengan konsep REPELITA yang berbasis pedesaan. Era berganti dan ekonomi kerakyatan tetap menjadi sebuah wacana yang semakin tidak jelas dan rakyat tetap berada dalam kemiskinan yang semakin kronis. Zaman reformasi pada masa pemerintahan SBY, pola pikir ekonomi tidak jauh berbeda dengan zaman orde baru. Pemerintah lebih menekankan pertumbuhan ekonomi daripada pemerataan ekonomi, sehingga terjadilah disparitas ekonomi yang luar biasa antara si kaya dengan si miskin. Seperti dilansir oleh Majalah Forbes yang berbasis di New York, Amerika Serikat telah disebutkan ada sekitar 40 orang

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

terkaya di Indonesia dengan total kekayaan mereka sebesar 88,6 miliar dollar AS atau setara Rp 850 triliun. Total kekayaan 40 orang ini pada tahun 2012 meningkat 4 persen dibandingkan dengan tahun 2011. Dengan demikian harta kekayaan Rp 850 triliun hanya dikuasai oleh 40 orang sementara bagi pekerja formal, termasuk buruh yang berjumlah 42,1 juta orang berbagi pendapatan senilai Rp 1450 triliun. Inilah perbedaan yang sangat menjulang antara si kaya dan si miskin ditengah sistem ekonomi pasar yang tidak melarang setiap orang memiliki kekayaan dalam jumlah yang begitu fantastis.

Pemerintah selama ini lebih cenderung pro investor bisa dibuktikan dengan banyaknya investor yang menguasai sektor-sektor strategis seperti energi, migas, dan lain-lain. Pemerintah juga mengalami ketergantungan kepada hutang luar negeri. Sedangkan di sektor riil seperti usaha kecil menengah banyak yang mengalami gulung tikar karena tidak bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar sehingga dengan demikian cita-cita untuk mewujudkan adanya keadilan dan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi masih jauh dari harapan, bahkan ini menjadi sebuah cerminan bahwa pemerintah belum maksimal dalam mengupayakan keberpihakan kepada pelaku ekonomi kecil menengah. Semua kebijakan yang memihak kepada rakyat adalah ekonomi kerakyatan, tidak perlu repot mendefinisikannya (Rizal Ramli, 2013), kemudian bila Ekonomi Kerakyatan yang direfleksikan sebagai Solidaritas Sosial Ekonomi dan berarti "Marilah membeli hasil produksi dalam negeri walau dengan harga yang sedikit mahal, atau marilah meminjam kepada koperasi walau dengan bunga yang lebih tinggi dari bank komersil", apakah ini adalah suatu keadilan?. Bila demikian, maka hambatan implementasi ekonomi kerakyatan seperti yang telah dikonsepkan oleh Bung Hatta pada masa sekarang adalah

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

bermuara pada paradigma berpikir baik dari pemerintah maupun rakyat Indonesia sendiri.

3. Fungsi Negara dalam Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi kerakyatan, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 33 UUD 1945, adalah sebuah sistem perekonomian yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi. Tiga prinsip dasar ekonomi kerakyatan adalah sebagai berikut:

a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan;
b. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; dan
c. Bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan ketiga prinsip tersebut dapat disaksikan betapa sangat besarnya peran negara dalam sistem ekonomi kerakyatan. Sebagaimana dilengkapi oleh Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34, peran negara dalam sistem ekonomi kerakyatan antara lain meliputi lima hal[19] sebagai berikut:

a. Mengembangkan koperasi;
b. Mengembangkan BUMN;
c. Memastikan pemanfaatan bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
d. Memenuhi hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak;
e. Memelihara fakir miskin dan anak terlantar.

[19]Revrisond Baswir, *Ekonomi Kerakyatan vs. Neoliberalisme*, Yogyakarta: Tim Ahli Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, 2009.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Peran negara dalam sistem ekonomi kerakyatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu[20]:

a. Menyusun perekonomian sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan; mengembangkan koperasi (Pasal 33 ayat 1)
b. Menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak; mengembangkan BUMN (Pasal 33 ayat 2).
c. Menguasai dan memastikan pemanfaatan bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat (Pasal 33 ayat 3).
d. Mengelola anggaran negara untuk kesejahteraan rakyat; memberlakukan pajak progresif dan memberikan subsidi.
e. Menjaga stabilitas moneter.
f. Memastikan setiap warga negara memperoleh haknya untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat 2).
g. Memelihara fakir miskin dan anak terlantar (Pasal 34).

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

4. Model Kajian Tokoh

Studi atau kajian tokoh merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif. Penelitian terkait studi tokoh ini dapat berbentuk studi kasus, multi kasus, multi situs, penelitian historis, penelitian kepustakaan, penelitian ekologi, penelitian fenomenologis, atau penelitian masa depan. Maka dari itu, kaidah yang harus dibangun dalam studi tokoh mengikuti kaidah penelitian kualitatif[21].

Terdapat tiga persyaratan penting dalam melakukan kajian tokoh[22], sebagai berikut:

---

[20] *Ibid.*
[21] Arif Furchan dan Agus Maimun, *Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 15.
[22] *Ibid*, hlm. 39-41.

a. Sistematis, artinya dilakukan menurut urutan atau pola tertentu. Sistematis juga mengacu pada kegiatan yang bersifat prosedural, artinya bahwa kegiatan kajian tokoh dilakukan dari tahap ke tahap, yang setiap tahapnya mempunyai konsekuensi dan implikasi sendiri-sendiri.
b. Terencana, artinya dilaksanakan dengan unsur kesengajaan dan melalui pemikiran yang serius, sehingga dari awal sudah dipikirkan berbagai peluang, tantangan, dan hambatan yang mungkin terjadi.
c. Mengikuti kaidah ilmiah, artinya dari awal hingga akhir kegiatan, studi dilakukan dengan mengikuti cara yang sudah ditentukan.

Sehubungan dengan kedekatan studi tokoh dengan studi kasus, dengan mengadopsi pemikiran Vredenbeegt yang dikutip oleh Bungin[23], terdapat 4 pendekatan studi tokoh, yaitu:

a. Pendekatan Tematis
   Aktivitas seseorang dideskripsikan berdasarkan sejumlah tema yang menggunakan konsep-konsep yang biasanya dipakai untuk mempelajari suatu bidang keilmuan tertentu, misalnya studi tokoh mengenai pemikiran pendidikan Islam di Indonesia, studi tokoh mengenai pemikiran hukum Islam di Indonesia, dan sebagainya. Pendekatan ini bersifat analitis sehingga dapat membedakan antara pemikiran sang tokoh dari pemikiran tokoh lain dalam suatu bidang keilmuan tertentu.
b. Pendekatan Otobiografi
   Pendekatan ini sangat luas dan intensif dari masing-masing tokoh. Teknik ini digunakan untuk memahami sang tokoh berdasarkan pendapat tokoh lain yang mempunyai disiplin keilmuan yang sama atau berbeda.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[23]Bungin,B., *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodo logis ke arah Penguasaan Model Aplikasi,* (Jakarta: Raja Afindo, 2003). hlm. 115.

Prinsipnya adalah, baik yang menilai maupun yang dinilai harus sama-sama tokoh. Pandangan bebas dari masing-masing tokoh terhadap sang tokoh yang menjadi fokus studi dapat membantu kesahihan dan keandalan data yang diperoleh dari teknik ini. Misalnya dalam pendidikan Islam, studi tokoh terhadap Prof. Zakiyah Daradjat. Dalam studi tokoh ini diharapkan adanya penilaian dari beberapa tokoh pendidikan Islam, seperti Prof. Mastuhu, Prof. Azyumardi Azra, Prof. Zakiyah Daradjat, dan sebagainya mengenai pemikiran pendidikan islam.

c. Pendekatan Masalah Khusus

Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif atau masalah khusus atau kejadian luar biasa atau kejadian gawat yang menyangkut sang tokoh. Bagaimana sang tokoh menghadapi persoalan baru yang sangat khusus dan bahkan luar biasa itu. Pengetahuan tentang hal ini akan mengungkapkan aspek-aspek yang laten dari psikodinamika kehidupan sang tokoh. Misalnya, studi tokoh terhadap Gus Dur dalam politik kenegaraan. Dari studi ini diharapkan akan dapat diungkap berbagai persoalan psikologis yang sangat rumit di saat pelengseran Gus Dur dari kursi kepresidenan, dan sebagainya.

d. Pendekatan *construction of days*

Pendekatan ini tidak terbatas pada cerita mengenai apa yang dialami sang tokoh pada hari kemarin tetapi dapat pula dipilih hari-hari tertentu secara acak, misalnya hari-hari yang biasa saja tanpa kejadian luar biasa. Namun dapat juga dipilih suatu hari yang berbeda dari hari-hari biasa, seperti 100 hari pelantikan sang tokoh dalam jabatan tertentu, atau 100 hari pertama dari pengangkatan dia menduduki jabatan tertentu, hari-hari disaat mengalami masa sulit dalam perjalanan hidupnya, atau hari-hari di saat masa keemasan dalam perjalanan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

hidupnya, dan seterusnya. Dengan kata lain, pendekatan ini lebih memfokuskan pada hari tertentu yang mempunyai nilai historis bagi sang tokoh selama karirnya atau selama hidupnya.

Mengkaji seorang tokoh, yang perlu diperhatikan adalah[24]:

a. Menguak pemikiran tokoh tersebut sebagaimana terekam dalam karya-karya tulisnya.
b. Dikaji pula biografi tokoh
c. Memahami korelasi antara ide-ide yang tertuang dalam karya-karya dengan aktivitas kesehariannya/ keilmuannya.

Studi pemikiran tokoh Islam di atas dapat juga disebut dengan *three dimensional approaches*. Dalam meneliti pemikiran tokoh Islam, ada tiga hal yang perlu diperhatikan[25]:

a. Harus memberikan perhatian yang cukup terhadap pemikiran tokoh-tokoh yang berpengaruh terhadap tokoh yang diteliti.
b. Bagaimana respon pemikiran tokoh tersebut terhadap ide-ide baru yang muncul di tengah masyarakat.
c. Seorang peneliti harus mempunyai bekal yang cukup tentang ajaran Islam itu sendiri).

Paparan teori terkait studi tokoh dari Arif Furqon, Ali Syariati dan John Obbert Voll tersebut dapat diambil benang merah, yaitu:

a. Perlunya mengetahui perjalanan hidup tokoh, termasuk pemikiran dan kondisi yang melatarbelakanginya dari awal sebelum pemikiran tersebut terbentuk secara rinci

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[24]Ali Syari'ati, *On the Sociology of Islam*, terj. Hamid Algar, Berkeley: Mizan Press, 1979, terutama Bab II, Approaches to the Understanding of Islam, hlm. 39-69.

[25]John Obert Voll, *Islam: Continuity and Change in the Modern World*, Boulder Colorado: Westview Press,1982, hlm. 2-4.

b. Perlunya landasan teori yang kuat dalam mengelaborasi dan mendalami gagasan tokoh
c. Perlunya menambahkan kritik pro dan kontra dari tokoh lain terkait gagasan tokoh yang diteliti.

Analisis data dalam studi atau kajian tokoh dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

a. Analisis domain
b. Analisis taksonomi
c. Analisis komponensial
d. Analisis tema kultural
e. Analisis komparasi konstan
f. Analisis intertekstualitas

Intertekstualitas adalah hakekat suatu teks yang di dalamnya ada teks lain. Dengan kata lain, intertekstualitas adalah kehadiran suatu teks pada teks lain[26]. Dalam pandangan Kristeva, teks sastra merupakan mosaik kutipan dari banyak teks. Maka, suatu teks tidak dapat berdiri sendiri[27]. Inilah yang dinamakan dengan intertekstualitas. Intertekstualitas merupakan proses linguistik dan proses diskursif. Dengan kata lain, intertekstualitas merupakan pelintasan tanda dari suatu sistem tanda ke sistem tanda yang lain.

Kristeva menggunakan istilah transposisi untuk menjelaskan pelintasan ini. Pelintasan ini selanjutnya berkelindan dengan sistem yang lain dalam wataknya yang saling mengukuhkan atau bahkan sebaliknya. Dalam transposisi menuju sistem pertandaan baru, bisa saja sistem pertandaan baru itu menggunakan material sama atau meminjam dari sumber-sumber yang berbeda[28].

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[26]Umar Junus, *Resepsi Sastra: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm. 87-89.
[27]Daniel Chander, *the Semiotics: the Basics*, (London: Routlegde, 2002), hlm. 195.
[28]Yasraf Amir Piliang, *Hipersemiotika: Tafsir Cultural Studies atas Matinya Makna*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2003), hlm. 136.

Berdasarkan prinsip teori intertekstual yang memandang teks sebagai transformasi teks-teks lain dan sebagai sebuah tindakan interpretasi, maka dapat dikatakan bahwa persoalan transformasi merupakan bagian esensial dalam teori intertekstual. Dalam transformasi teks, Teeuw[29] menyebutkan ada empat pertanyaan penting yang harus diperhatikan, yaitu (a) mengapa satu teks dipilih secara khusus dalam suatu transformasi (b) apakah yang terjadi pada teks dalam proses transformasi itu. Apakah ada bagian-bagian teks yang diubah, diadaptasi ataukah ditransformasi, baik dalam bentuk sastranya maupun dalam fungsi sosialnya. (c) apakah yang dilakukan teks sumber terhadap teks transformasi itu. Apakah ada dampak, misalnya teks sumber mempengaruhi sistem sastra yang terkait, teks sumber menyebabkan terciptanya *genre* baru, teks sumber mempengaruhi norma-norma dan konvensi-konvensi, ataukah memutuskan horison harapan pembaca masa kini. (d) apakah yang dilakukan teks transformasi itu terhadap teks sumbernya. Bagaimanakah teks sumber itu diterima, diadaptasi, atau mungkin pada beberapa bagian ditolak atau ditinggalkan

Analisis data dilakukan dengan mengamati hubungan intertekstualitas (interdiskursivitas) pada teks sumber dan teks sasaran sebagai landasan penjelasan teknik interpretasi pemikiran Mubyarto terkait ekonomi kerakyatan. Dari sini, penjelasan terkait rekontekstualisasi makna dijabarkan untuk menjelaskan realitas sosial.

5. Etika Ekonomi Islam

Peningkatan spiritual manusia adalah suatu unsur penting dari kesejahteraan manusia dan usaha apapun yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang bertentangan dengan

[29]Teeuw, *Membaca dan Menilai Sastra*. (Jakarta: Gramedia, 1983), hlm. 5.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ajaran Islam akan berakhir dengan kegagalan[30]. Pencapaian tujuan berupa *falah* berkaitan erat dengan nilai-nilai yang disebut nilai etika. Prinsip-prinsip bisnis dalam Islam meliputi :

a. Prinsip Kesatuan (*Tauhid*)

Berdasarkan prinsip *tauhid* ini, maka para pelaku keuangan *syari'ah* tidak melakukan bisnisnya, paling tidak pada tiga hal[31]; pertama, melakukan tindakan diskriminasi terhadap pihak lain yang terdapat dalam QS Al-Hujurat (49): 13

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ

"Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa -bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu[32]. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal)."

Kedua, terpaksa atau dipaksa melakukan praktik-praktik bisnis yang terlarang, karena hanya Allah lah yang semestinya ditakuti dan dicintai. Ketiga, menimbun kekayaan atau serakah, karena pada hakikatnya kekayaan merupakan milik dan amanat Allah semata, seperti yang terdapat dalam QS Al Kahfi (18): 46

ٱلۡمَالُ وَٱلۡبَنُونَ زِينَةُ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۖ وَٱلۡبَٰقِيَٰتُ ٱلصَّٰلِحَٰتُ خَيۡرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابٗا وَخَيۡرٌ أَمَلٗا

"Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh

---

[30]Umer Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 6.

[31]Kuat Ismanto, *Manajemen Syari'ah Impelementasi TQM Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 27.

[32]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2008).

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan[33]*."*

b. Prinsip Kebolehan (*Ibahah*)

Prinsip kebolehan adalah konsep halal dan haram tidak saja pada barang yang dihasilkan dari sebuah hasil usaha, tetapi juga pada proses mendapatkannya. Artinya barang yang diperoleh harus dilakukan dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syari'at Islam.

Penerapan prinsip ini sangat berkaitan dengan sesuatu yang menjadi objek bisnis, dan merupakan sebuah pondasi dasar kehalalan. Perdagangan Islam hanya mengandung kehalalan yang nyata dan jelas, yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Pelarangan ini ditujukan untuk melindungi para pihak agar terhindar dari dosa.

c. Prinsip Keadilan (*Al-'Adl*)

Keadilan merupakan prinsip dasar dan utama yang harus ditegakkan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk kehidupan berekonomi. Prinsip ini mengarahkan pada para pelaku keuangan *syari'ah* agar tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain dalam melakukan aktivitas ekonominya. Islam juga menganut asas kebebasan, akan tetapi kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan terikat, artinya kebebasan dalam melakukan transaksi dengan tetap memegang nilai-nilai keadilan, ketentuan agama dan etika[34].

d. Prinsip Kehendak Bebas (*Al-Hurriyah*)

Kehendak bebas dalam Islam berarti kebebasan yang dibatasi oleh keadilan. Sesungguhnya, kebebasan ekonomi yang disyariatkan Islam bukanlah kebebasan

---

[33]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2008).

[34]Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 173.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

mutlak yang terlepas dari ikatan seperti yang diduga oleh kaum Syu'aib dalam QS Hud (11): 87

قَالُوا۟ يَٰشُعَيْبُ أَصَلَوٰتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَآ أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِىٓ أَمْوَٰلِنَا مَا نَشَٰٓؤُا۟ ۖ إِنَّكَ لَأَنتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ

"Mereka berkata: "Hai Syu'aib, Apakah sembahyangmu menyuruh kamu agar Kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak Kami atau melarang Kami memperbuat apa yang Kami kehendaki tentang harta kami. Sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat Penyantun lagi berakal[35]".

e. Prinsip Pertanggungjawaban

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil bagi umat Islam. Islam mengajarkan bahwa semua perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Dalam memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya, termasuk dalam hal ini adalah dalam kegiatan ekonomi bisnis[36].

f. Prinsip Kebenaran: Kebajikan dan kejujuran

Realisasi prinsip kebajikan dalam bisnis Islam adalah sikap keramah tamahan dan kesukarelaan. Keberhasilan dan kegagalan dalam ekonomi Islam selalu berkaitan dengan adanya sifat tidak jujur.

g. Prinsip Kerelaan (*Ar-Riḍa*)

Prinsip ini menjelaskan bahwa segala bentuk kegiatan ekonomu harus dilaksanakan suka rela, tanpa ada unsur paksaan antara pihak-pihak yang terlibat dengan kegiatan tersebut.

h. Prinsip Kemanfaatan

---

[35]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2008).

[36]Kuat Ismanto, *Manajemen Syari'ah Impelementasi TQM Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 33-34.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Para pelaku keuangan *syari'ah* harus mempunyai dasar dalam pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madhlarat, baik bagi para pelakunya maupun masyarakat secara keseluruhan dalam melakukan kegiatan bisnis atau muamalah.

i. Prinsip Haramnya Riba

Prinsip ini merupakan implementasi dari prinsip keadilan. Adanya pelarangan riba dalam aktivitas ekonomi, karena terdapatnya unsur aniaya diantara para pihak yang melakukan kegiatan tersebut, yang salah satunya adalah pihak yang di dzalimi. Hal ini dapat berakibat rusaknya tatanan perekonomian yang berdasarkan pada ajaran Islam.

Nilai-nilai atau ajaran moral dalam Islam tidak bisa dipisahkan dari konsep Tauhid, yang merupakan titik sentral dari ajaran Islam. Dalam bidang ekonomi, Tauhid merupakan keyakinan bahwa Allah sebagai pemberi dan pengatur rizki bagi hamba-Nya, pemilik sempurna dari harta yang dititipkan kepada umat manusia. Keyakinan ini menimbulkan paradigma baru bagi orang yang beriman bahwa kegiatan usaha harus disandarkan pada nilai-nilai yang telah ditetapkan dan keyakinan akan adanya pengawasan Allah. Keyakinan akan adanya pengawasan Allah inilah yang akan membentuk sikap mental dan etika (akhlak) para pelaku usaha.

Contoh nyata bagi umat Islam dalam berniaga adalah menurut cara berniaga yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sebelum diangkat sebagai seorang Nabi dan Rasul, beliau adalah seorang pedagang atau saudagar yang sukses. Keberhasilan beliau dalam niaga tentunya tidak bisa lepas dari bimbingan Allah SWT dan kemuliaan akhlak yang terpancar dari pribadi beliau.

Setelah paparan teori yang telah dijelaskan sebelumnya, teori tersebut digunakan sebagai rangka

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

bangun teori dalam penyusunan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

a. Ekonomi kerakyatan dalam penelitian ini adalah suatu aktivitas ekonomi yang didalamnya terdapat keterlibatan seluruh elemen rakyat, baik itu rakyat dengan pendapatan kecil, menengah, besar dan juga didalamnya keterlibatan pemerintah untuk ikut mengawasi dan membuat kebijakan secara adil agar terwujud aktivitas produksi, distribusi dan konsumsi yang baik, adil, dan sesuai dengan kultur masyarakat dalam suatu negara.
b. Model kajian tokoh dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis intertekstualitas.

   Paparan teori terkait studi tokoh dari Arif Furqon, Ali Syariati dan John Obbert Voll tersebut dapat diambil benang merah, yaitu:

   1) Perlunya mengetahui perjalanan hidup tokoh, termasuk pemikiran dan kondisi yang melatarbelakanginya dari awal sebelum pemikiran tersebut terbentuk secara rinci
   2) Perlunya landasan teori yang kuat dalam mengelaborasi dan mendalami gagasan tokoh
   3) Perlunya menambahkan kritik pro dan kontra dari tokoh lain terkait gagasan tokoh yang diteliti.

   Dalam pengkajian ini dilakukannya berdasarkan[37]:

   1) Pemikiran Mubyarto yang tertuang dalam karya-karya beliau
   2) Pengkajian Biografi Mubyarto
   3) Hubungan antara ide pokok yang tertuang dalam karya Mubyarto dan aktivitas keilmuannya.

[37]Ali Syari'ati, *On the Sociology of Islam*, terj. Hamid Algar, Berkeley: Mizan Press, 1979, terutama Bab II, " *Approaches to the Understanding of Islam*, hlm. 39-69

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Analisis data dilakukan dengan mengamati hubungan intertekstualitas (interdiskursivitas) pada teks sumber dan teks sasaran sebagai landasan penjelasan teknik interpretasi pemikiran Mubyarto terkait ekonomi kerakyatan. Dari sini, penjelasan terkait rekontekstualisasi makna dijabarkan untuk menjelaskan realitas sosial.

c. Etika ekonomi Islam dalam penelitian ini adalah suatu sikap atau perilaku yang penuh dengan kesadaran dilakukan dalam melakukan aktivitas ekonomi dan sesuai dengan ajaran Islam yang ditunjukkan dengan berbagai macam prinsip etika. Penelitian ini menitikberatkan prinsip keadilan yang menjadi puncak dari keberadaan etika. Karena dengan keadilan, maka prinsip-prinsip yang lain dalam berperilaku sesuai dengan etika sudah termasuk di dalamnya. Terutama dalam Islam, bahwa keadilan menjadi titik balik dari keserakahan yang dilakukan manusia dan merupakan bukti kongkrit ibadah kepada Allah.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB III
METODE PENELITIAN

Bab metode penelitian ini menyatakan bahwa jenis penelitian adalah studi tokoh yang merupakan bagian dari penelitian kualitatif, dengan sumber referensi primernya yaitu beberapa buku yang ditulis Mubyarto pada rentang tahun 2003-2005 juga buku terkait etika Islam yang ditulis Yusuf Qardhawi dan sumber referensi sekunder terkait dengan ekonomi kerakyatan juga fungsi Negara dari beberapa tokoh. Pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah filosofis, historis dan sosiologis dengan teknik analisis data yang digambarkan dalam model interaktif Miles Hubberman seperti yang dijelaskan berikut ini.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian studi tokoh, yang merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif[1], yaitu penelitian yang tidak mengadakan penghitungan matematis, statistik dan lain sebagainya.

B. Sumber Referensi

1. Sumber Referensi Primer

   Sumber primer yang diambil dari seluruh karangan yang ditulis Mubyarto dan berkaitan langsung dengan pemikiran ekonominya dan buku tersebut ditulis oleh Mubyarto di rentang tahun 2000-2005. Diantara buku primer tersebut yaitu;

   a. Mubyarto, 2003, *Ekonomi Pancasila: Renungan Satu Tahun PUSTEP UGM*, Yogyakarta: PUSTEP UGM

[1]Arif Furchan dan Agus Maimun, *Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 15.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

b. Mubyarto, 2004, *Gagasan Besar Ekonomi dan Kemajuan Kemanusiaan: Antara Ilmuwan dan Seniman Ekonomi*, Yogyakarta: Aditya Media.
c. Mubyarto, 2004, *Teori Ekonomi dan Kemiskinan*, Yogyakarta: Aditya Media.
d. Mubyarto, 2004, *Revolusi Menuju Sistem Ekonomi Pancasila*, Yogyakarta: Aditya Media.
e. Mubyarto, 2004, *Ekonomi Pancasila: Evaluasi Dua Tahun PUSTEP UGM*, Yogyakarta: Aditya Media dan PUSTEP UGM.
f. Mubyaro, 2005, *Menggugat Ketimpangan dan Ketidakadilan Ekonomi Nasional*, Yogyakarta: Aditya Media dan PUSTEP UGM.
g. Qardhawi, Yusuf., 1997, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press.

2. Sumber Referensi Sekunder

Sumber referensi sekunder adalah buku, artikel maupun jurnal yang terkait dengan topik pembahasan dan dijadikan sebagai sumber rujukan, sebagai berikut:

a. Sri Edi Swasono, 1987, *Membangun Sistem Ekonomi Nasional*, Jakarta: UI Press.
b. Sri Edi Swasono, 2009, *Kembali ke UUD 1945: Menegakkan Pancasila Melawan Penjajahan Ekonomi*, Jakarta: Yayasan Kepada Bangsaku.
c. Edy Suandi Hamid, Ekonomi Pancasila Tantangan Bagi Ekonom, Artikel Koran
d. Fahri Hamzah, 2012, *Negara, BUMN dan Kesejahteraan Rakyat,* Jakarta: Faham Indonesia.
e. Eddy Purnama, 2007, *Negara Kedaulatan Rakyat,* Bandung: Nusamedia.

Selain itu, teknik wawancara juga diperlukan dalam penelitian ini. Wawancara yang dilakukan merupakan wawancara tidak langsung, yaitu wawancara yang dilakukan oleh peneliti

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

kepada orang lain yang mengkonfirmasi tentang aktivitas dan produktivitas sang tokoh[2] yang telah ditulis oleh peneliti. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan cara konfirmasi kepada informan terkait hasil penelitian, yang dalam hal ini adalah:

a. Edy Suandi Hamid Sebagai Murid sekaligus orang terdekat Mubyarto
b. Pusat Studi Ekonomi Pancasila (PUSTEP) UGM Sebagai lembaga yang *concern* mendalami pemikiran Mubyarto.

C. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filosofis. Fungsi pendekatan ini untuk mengungkap titik temu nilai kebenaran sisi etika ekonomi dalam ekonomi rakyat dan ekonomi Islam, sehingga tidak terjebak pada aspek formalitas ekonomi. Dengan kata lain pendekatan filosofis dimaksudkan untuk menjelaskan inti, hakikat, atau hikmah mengenai sesuatu yang berada di balik obyek formalnya. Dalam arti untuk mencari sesuatu yang mendasar, asas, dan inti yang terdapat di baliknya yang bersifat lahiriyah[3]. Selain pendekatan itu, pendekatan historis pun diperlukan. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menyatupadukan semua unsur dalam konstruksi teratur[4], sehingga dapat dihasilkan suatu nilai yang terkandung dalam gagasan ekonomi kerakyatan Mubyarto.

Pendekatan lain yang digunakan adalah pendekatan sosiologis yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan masyarakat beserta struktur, lapisan dan beberapa gejala sosial lainnya yang saling berkaitan, sehingga suatu fenomena sosial dapat dianalisa secara proporsional dan tepat lewat faktor-faktor

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[2]Arif Furchan dan Agus Maimun, *Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 53.
[3]Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 42-45.
[4]Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

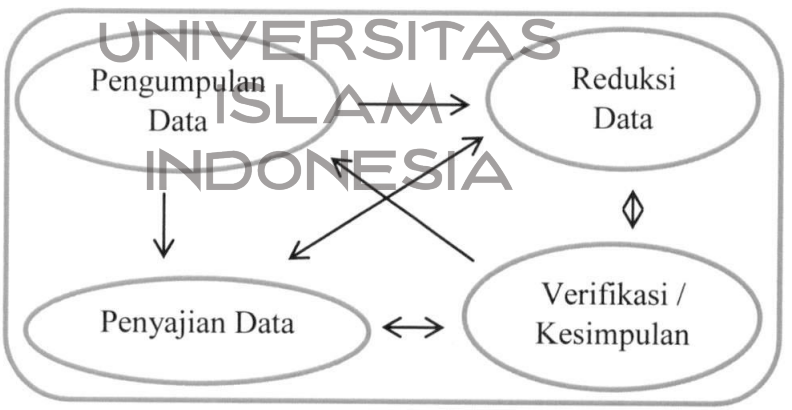
yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial, serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut[5].

D. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasi data yang diperoleh kedalam sebuah kategori, menjabarkan data kedalam unit-unit, menganalisis data yang penting, menyusun atau menyajikan data yang sesuai dengan masalah penelitian dalam bentuk laporan dan membuat kesimpulan agar mudah untuk dipahami. Sesuai dengan jenis penelitian di atas, maka peneliti menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman untuk menganalisis data hasil penelitian.

Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun model interaktif yang dimaksud sebagai berikut:

Gambar 1. Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif[6]



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[5]Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 39.

[6]Miles, Huberman dan Saldana., *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. (USA: Sage Publications, 2014). Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press, hlm. 14.

Komponen-komponen analisis data model interaktif dijelaskan sebagai
berikut:

1.Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Penelitian tesis ini menggunakan metode dokumentasi dan wawancara seperti yang telah dijelaskan di atas, langkahnya dengan dilakukan identifikasi wacana dari buku-buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, koran, website resmi, ataupun informasi lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian untuk mencari variabel yang mempunyai keterkaitan dengan kajian tentang ekonomi kerakyatan dalam pemikiran Mubyarto dan menelaah dari perspektif etika ekonomi Islam.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Suharsimi Arikunto, metode dokumentasi adalah mencari suatu data mengenai suatu alat atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti-prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.[7]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2.Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh peneliti di lapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi direduksi dengan cara merangkum, memilih dan memfokuskan data pada hal-hal yang sesuai dengan tujuan penelitian. Peneliti tahap ini melakukan reduksi data dengan cara memilah-milah, mengkategorikan dan membuat abstraksi dari catatan lapangan, wawancara dan dokumentasi.

---

[7]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta : Adi Mahasatya, 2013), hlm. 274.

3.Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan setelah data selesai direduksi atau dirangkum. Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dianalisis kemudian disajikan dalam bentuk CW (Catatan Wawancara), CL (Catatan Lapangan), dan CD (Catatan Dokumentasi). Data yang sudah disajikan dalam bentuk catatan wawancara, catatan lapangan dan catatan dokumentasi diberi kode data untuk mengorganisasi data, sehingga peneliti dapat menganalisis dengan cepat dan mudah. Peneliti membuat daftar awal kode yang sesuai dengan pedoman wawancara, observasi dan dokumentasi. Masing-masing data yang sudah diberi kode dianalisis dalam bentuk refleksi dan disajikan dalam bentuk teks.

4.Kesimpulan (*Conclusion*)

Kesimpulan, penarikan, atau verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*). Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif model interaktif adalah penarikan kesimpulan dari verifikasi. Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah dan pertanyaan yang telah diungkapkan oleh peneliti sejak awal.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil penelitian terkait biografi Mubyarto, pendidikan, karir, karya-karya Mubyarto dan konsep ekonomi kerakyatan Mubyarto dalam tiga pokok, yaitu sistem ekonomi, etika dan moral juga implementasi dari ekonomi kerakyatan yang digagas Mubyarto. Pembahasan tersebut dielaborasi dari perspektif etika ekonomi Islam dan kontribusinya terhadap keadilan ekonomi daerah di Indonesia, yang hasilnya yaitu ekonomi kerakyatan Mubyarto adalah ekonomi yang berkeadilan dan sesuai dengan kultur masyarakat, sehingga pengembangan ekonomi Islam di Indonesia, yang juga merupakan ekonomi alternatif harus mampu belajar dari Mubyarto dengan mempertimbangkan masalah etika, moral dan kultur masyarakat.

A. Hasil Penelitian

1. Biografi Mubyarto

Mubyarto lahir di Sleman, Yogyakarta tepatnya pada tanggal 3 September 1938. Masa kecilnya hingga sarjana muda dihabiskan di Yogyakarta. Guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada yang telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Dr. Sardjito Yogyakarta pada Selasa 24 Mei 2005 pukul 13.49 WIB. Guru Besar ekonomi kelahiran 3 September 1938 itu meninggalkan seorang istri bernama Sri Hartati Widayati dan empat orang anak diantaranya Andianto Hidayat, Tantiarini Hidayati, Satriantono Hidayat, dan Dadit Gunarwanto Hidayat, serta enam orang cucu. Mubyarto yang akrab dipanggil Muby itu sempat dirawat secara intensif selama empat hari karena menderita paru-paru basah dan serangan jantung ringan. Jenazah disemayamkan di rumah duka Perumahan Dosen

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

UGM, Sawit Sari C-10 Condongcatur, Depok, Sleman. Untuk mendapatkan penghormatan terakhir dari civitas akademika UGM, jenazah disemayamkan terlebih dahulu di Balairung UGM pada Rabu 25 Mei 2005 pukul 11.00 WIB, kemudian dikebumikan di Makam Keluarga UGM di Sawit Sari sekitar pukul 13.00 WIB.

2. Pendidikan dan Karir Mubyarto

Mubyarto menghabiskan masa kecilnya di Yogyakarta tanah kelahirannya. Beliau memulai pendidikannya dari awal yaitu dari Sekolah Dasar (SD) di Demak, Jawa Tengah pada tahun 1950. Setelah beliau menamatkan di SD, maka melanjutkannya ke jenjang selanjutnya yaitu ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri III Yogyakarta tepatnya pada tahun 1953. Dan masuk Sekolah Menengah Atas (SMA) 1 BOPKRI pada tahun 1956 dan masih berada pada kota yang sama, yaitu Yogyakarta. Tiga tahun berada di jenjang pendidikan SMA, dan menamatkannya pada tahun 1959. Bersamaan dengan tahun ini, beliau masuk ke Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada.

Tahun 1962 setelah menamatkan kuliah, beliau berangkat ke Amerika Serikat untuk menggali ilmu lebih dalam lagi yaitu masuk ke Vanderbilt University yang kemudian memperoleh gelar MA. Tahun 1965 beliau masuk ke Lowa State University yang masih berada di Amerika Serikat (Ph.D). Tahun 1979, beliau masuk ke Lembaga Penelitian Pangan Stanford University, California Amerika Serikat.

Profesi utama Mubyarto adalah dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada (UGM) yang berawal dari tahun 1959 hingga tahun 2003. Salah satu jabatan penting di dalam karirnya bersama UGM adalah pada saat menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan (P3PK) UGM dari tahun 1983 hingga tahun 1994.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Selama dipimpin oleh Mubyarto, P3PK secara intensif melakukan berbagai penelitian di bidang pedesaan dengan bekerjasama dengan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Kemudian pada periode tahun 1987 hingga 1999, ia menjadi anggota Majelis Permusywaratan Rakyat (MPR). Sejak tahun 2002, ia menjabat sebagai Kepala Pusat Studi Ekonomi Pancasila (PUSTEP) UGM sampai beliau kemudian meninggal pada tahun 2005. Pustep didirikan oleh UGM dibawah pimpinan Rektor Sofyan Efendi untuk mendalami dan mengembangkan konsep Ekonomi Pancasila yang telah ramai menjadi bahan diskusi utama ekonomi Indonesia sejak tahun 1980[1], untuk mengembangkan ilmu ekonomi yang dapat membantu siswa dan mahasiswa memahami kenyataan-kenyataan ekonomi yang dihadapi di masyarakat, mengkaji ulang teori dan konsep ekonomi dalam pelajaran ekonomi pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan tinggi, dan juga mencari dan menemukan kebijakan-kebijakan alternatif untuk menyejahterakan rakyat, menanggulangi kemiskinan dan mengatasi ketimpangan ekonomi berdasarkan etika Pancasila[2].

Mubyarto pernah menjabat sebagai Penasehat Menteri Perdagangan pada tahun 1968 sampai tahun 1971, Asisten Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) tahun 1993 hingga tahun 1998, dan Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Keuangan, dan Industri pada tahun yang sama. Dalam bukunya berjudul "Apa dan Siapa: Sejumlah Orang Indonesia 1985-1986", konsep Ekonomi Pancasila yang dikembangkan Mubyarto sempat ditertawakan sejumlah kalangan. Konsepnya yang sangat normatif dinilai sangat sulit untuk diterapkan di

[1]Sri-Edi Swasono, *Membangun Sistem Ekonomi Nasional*, (Jakarta: UI Press, 1987), hlm. 284.

[2]Mubyarto, *Ekonomi Pancasila:Renungan Satu Tahun PUSTEP UGM*, (Yogyakarta: Aditya Media, 2003), hlm sampul.

Indonesia meskipun dikembangkan dari dasar negara Indonesia Pancasila. Satu hal yang selalu disampaikan Mubyarto untuk menjawab kesalahpahaman yang telah terlanjur menjadi pemahaman umum adalah bahwa dia bukan penemu Ekonomi Pancasila. Dia hanya mengembangkan lebih lanjut konsep Ekonomi Pancasila setelah idenya didengungkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta, dan pertama kalinya dirumuskan oleh Emil Salim.

Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) adalah salah satu program pemerintah yang diluncurkan Mubyarto pada tahun 1993 pada saat menjabat sebagai Asisten Menteri Pembangunan Perencanaan Nasional/Kepala Bappenas, yaitu menghibahkan dana pemerintah kepada kelompok masyarakat secara musyawarah dengan menggunakan konsep dana bergulir. Program IDT ini adalah hasil pemikiran Mubyarto bersama dengan koleganya, misalnya yang tergabung di dalam Yayasan Agro Ekonomika (YAE) seperti sosiolog pedesaan IPB Sayogyo dan Direktur LSM Bima Swadaya Bambang Isnawan. Program IDT sebagai program pengentasan kemiskinan telah berhenti, namun konsep hibah dana bergulir yang dikembangkan oleh Mubyarto dkk sampai sekarang masih digunakan dalam bentuk program-program lain di berbagai sektor pembangunan di Indonesia. Kemudian agar lebih jelas, maka peneliti akan memberikan poin-poin karir beliau, diantaranya:

a. Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) dari tahun 1959 hingga beliau pension
b. Guru Besar Ekonomi UGM
c. Direktur Pendidikan Pascasarjana, fakultas Ekonomi UGM dimulai tahun 1976
d. Direktur Riset Institute Fakultas Ekonomi UGM (1965-1975
e. Peneliti pada *Departement of Economics Research School of Pasific Studies, Australian National University*, Canberra, Australia (1971-1972)

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

f. Konsultan Menteri Perdagangan (1968-1973)
g. Ketua Asosiasi Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi; 1969-1973)
h. Kepala Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan UGM (1983-1994)
i. Asisten Menteri (Asmen) II Menteri Negara (Meneg) Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas
j. Staf Ahli Menko Ekuin Bidang Pemerataan Pembangunan, dan penanggulangan Kemiskinan (17 April 1998)
k. Guru Besar dalam Ilmu Ekonomi Pertanian UGM. Pidato pengukuhannya berjudul "Gagasan dan Metode Berfikir Tokoh-Tokoh Besar Ekonomi dan Penerapannya bagi Kemajuan Kemanusiaan" (19 Mei 1979)
l. Pencetus Ide Ekonomi Pancasila.
m. Kemudian kegiatan lain beliau adalah sebagai anggota Asosiasi Ilmu Politik Indonesia yang biasanya disingkat dengan AIPI yakni pada tahun 1991, sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) pada tahun 1987, anggota Badan Pekerja MPR RI dari tahun 1992-1997, anggota Dewan Riset Nasional Kelompok pada tahun 1994 hingga tahun 1999, Editor *Bulletin of Economics Studies*, Canberra Australia, dan sebagai Ketua Yayasan Agro Ekonomika pada tahun 1980.

3. Karya Mubyarto

Mubyarto semasa hidupnya dikenal paling fokus pada ekonomi rakyat. Awal keberpihakan Mubyarto pada rakyat tani bermula pada tahun 1969 yang mana ramai diperbincangkan terkait peningkatan jumlah produksi beras, diantaranya merupakan salah satu media yang merilis berita berisi produksi beras tahun 1969 yang telah mencapai 11,14

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

juta ton. Angka ini telah melebihi target awal yang ditetapkan pemerintah yaitu sebesar 10,5 juta ton[3].

Karya-karya beliau sudah banyak diterbitkan oleh berbagai penerbit dalam bentuk buku dan berbagai bentuk karya-karya lainnya. berikut: Adapun buku-buku beliau beserta penerbit, tahun terbit dan kota terbitnya adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Karya Mubyarto

Karya Terkait Ekonomi Kerakyatan			
No	**Judul Buku**	**Tahun**	**Kota Terbit**
1.	Pembangunan Ekonomi Indonesia	1991	UGM Presss
2.	Pancasila economic system: Its Feature and Conceptual Basis	1993	UGM Press
3.	Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan	1993	LP3ES
4.	Masyarakat Terasing, 1994-1997: Kaji Tindak Program IDT	1994	BPPN
5.	Keswadayaan Masyarakat Desa Tertinggal	1994	Aditya Media
6.	Ekonomi Rakyat dan Program IDT	1996	Aditya Media
7.	Ekonomi Pertanian dan Pedesaan	1996	Aditya Media
8.	Dinamika Perubahan Sosial Ekonomi Pedesaan	1996	Aditya Media
9.	Ekonomi Pancasila: Lintasan Pemikiran Mubyarto	1997	Aditya Media
10.	Ekonomi Rakyat, Program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia	1997	Aditya Media
11.	Kembali ke Ekonomi Pancasila: Pemerataan Pembangunan dan Penanggulangan Kemiskinan	1998	Aditya Media

[3]Rilis berita Antara, "Dept. Perta"

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

12.	Mendampingi Perkembangan Ekonomi Rakyat: Laporan Kaji Tindak Provinsi Sulawesi Tengah	1998	Aditya Media
13.	Krisis ekonomi dan perekonomian rakyat gugus Nusa Tenggara	1998	Aditya Media
14.	Reformasi Sistem Ekonomi: Dari Kapitalisme menuju Ekonomi Kerakyatan	1999	Aditya Media
15.	Membangun Sistem Ekonomi	2000	BPFE UII
16.	Prospek Otonomi Daerah dan Perekonomian Indonesia Pasca Krisis Ekonomi	2001	BPFE UII
17.	Amandemen Konstitusi dan Pergulatan Pakar Ekonomi	2001	Aditya Media
18.	Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan Peranan Ilmu-Ilmu Sosial	2002	YAE Jakarta
19.	Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan Peranan Ilmu-ilmu sosial	2002	Aditya Media
20.	Ekonomi Pancasila: Landasan Pikir dan Misi Pendirian Pusat Studi Ekonomi	2003	BPFE UII
21.	Ekonomi Pancasila: Renungan Satu Tahun PUSTEP-UGM	2003	Aditya Media
22.	Ekonomi Pancasila Evaluasi Dua Tahun PUSTEP UGM	2004	Aditya Media
23.	Revolusi Menuju Sistem Ekonomi Pancasila	2004	Aditya Media
24.	Teknokrat dan Ekonomi Pancasila	2004	PUSTEP UGM dan Aditya Media
25.	Pendidikan Ekonomi Alternatif	2004	PUSTEP UGM dan Aditya Media

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

26.	Ekonomi Pasar Populis	2004	Aditya Media dan PUSTEP
27.	*A Development Manifesto: The Resilience of Indonesian Ekonomi Rakyat During The Monetary Crisis*	2005	Aditya Media
28.	Ekonomi Terjajah	2005	Aditya Media

Karya Terkait Moral dan Etika			
1.	Ilmu Ekonomi, Ilmu Sosial dan Keadilan	1980	YAE Jakarta
2.	Moral Ekonomi Pancasila	1982	Yayasan Idayu
3.	Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia	1988	LP3ES
4.	Etos Kerja dan Kohesi Sosial	1991	Aditya Media
5.	Ekonomi dan Keadilan Sosial	1995	Aditya Media

Banyak lagi karya-karyanya yang lain, seperti penelitiannya mengenai: *pertama,* Studi Sosial Ekonomi (Sosek), Sosial Budaya (Sosbud), Sosial Politik (Sospol) Barelang. *Kedua,* Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) di Indonesia. Kemudian beliau juga memperoleh penghargaan, diantaranya:

a) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)
b) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) pada tahun 1971
c) Bintang Jasa Utama dari Presiden tepatnya pada tahun 1994.

B. Konsep Ekonomi Kerakyatan Mubyarto

Ekonomi kerakyatan dalam sejarahnya merupakan istilah yang relatif baru. Istilah ini dipopulerkan untuk mengganti istilah "ekonomi rakyat" yang konotasinya dianggap negatif dan

bersifat diskriminatif. Dinilai negatif karena dilawankan dengan ekonomi konglomerat, dan dinilai diskriminatif karena dirancang secara terbuka untuk memihak pada salah satu sektor ekonomi tertentu yaitu golongan ekonomi lemah yang disingkat GEL atau rakyat kecil. Penilaian tersebut muncul di era paska konglomerasi karena merasa keberatan atas kebijakan yang diskriminatif datang dari golongan kuat/konglomerat yang harus kehilangan hak-hak istimewa yang telah dinikmati selama berpuluh-puluh tahun, khususnya pada tahun 1987-1994[4].

Selain itu yang lebih menarik adalah keberatan dari pakar-pakar ekonomi muda yang kebanyakan baru pulang dari belajar di luar negeri dengan gelar Ph.D, mereka merasa muak dengan istilah ekonomi yang dibalikinya bermuatan pesan politik dari pemerintah. Walaupun pesan tersebut bersifat membela rakyat kecil, juga mendapat pembelaan dari para pakar ekonomi, tetapi karena pejabat pemerintah tertentu juga bergabung dalam partai politik yang bersaing dalam agenda PEMILU, maka pesan tersebut dicurigai oleh para pakar ekonomi muda. Keberatan yang lainnya juga terhadap istilah ekonomi Pancasila adalah karena para pakar ekonomi muda merasa pemerintah Orde Baru secara sepihak memonopoli pengertian tersebut dan dimanfaatkan sebagai pembenaran atas berbagai kebijakan yang berpihak pada ekonomi konglomerasi[5].

Sidang istimewa MPR bulan November 1998 telah menghasilkan sejumlah ketetapan reformatif terkait koreksi fundamental dan tatanan-tatanan ekonomi Orde Baru. Salah satu ketetapan tersebut berjudul "Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi", yang berarti perlunya menyusun politik ekonomi baru yang berbeda, karena yang diterapkan pemerintah Orde Baru tidak membangun dan mengembangkan ekonomi rakyat. Dalam TAP MPRS No. XVI/1998[6] ditegaskan perlunya

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[4]Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi,* (Yogyakarta: BPFE, 2000), hlm. 240.
[5]*Ibid.*
[6]TAP MPRS No. XVI/1998.

penerapan sistem ekonomi kerakyatan yang berpihak pada upaya pemberdayaan ekonomi rakyat[7].

Pemberdayaan tersebut dianggap penting bukan hanya karena ketertinggalan sektor ekonomi rakyat dari sektor ekonomi menengah dan besar, tetapi juga karena ketimpangan ekonomi yang besar menimbulkan kecemburuan sosial. Kemiskinan dan kesenjangan ini menjadi masalah besar bagi Indonesia pada akhir abad 20 dan awal abad 21 yang merupakan akibat dari bekerjanya sistem ekonomi kapitalis liberal[8].

Ada tiga pemikiran penting tentang ekonomi kerakyatan yang terdapat dalam buku-buku karya Mubyarto yang menjadi sumber primer dan perlu dikemukakan di sini dengan sekaligus menganalisisnya dengan analisis intertekstual. Ekonomi kerakyatan disini bisa dikatakan sebagai subsistem dari sistem ekonomi Pancasila[9].

1. Sistem Ekonomi Kerakyatan Mubyarto

   Pemikiran pertama adalah terkait sistem ekonomi Indonesia yang digagas Mubyarto. Dalam pemikirannya, masalah sistem ekonomi Indonesia disebutkan secara eksplisit dalam setiap sumber buku primer dalam penelitian ini. Bermula dalam pendahuluan Ekonomi Pancasila Renungan Satu Tahun yang menyebutkan bahwa pandangan skeptis para ekonom terkait ekonomi kerakyatan yang dipopulerkan Mubyarto dengan sebutan Ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang bukan-bukan, yang artinya bahwa ekonomi Pancasila bukan ekonomi kapitalis, dan bukan ekonomi sosialis[10].

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[7]Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi,* (Yogyakarta: BPFE, 2000), hlm. 243.
[8]*Ibid*, hlm. 244.
[9]Edy Suandi Hamid, *Ekonomi Indonesia dari Sentralisasi ke Desentralisasi*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm. 33.
[10]Mubyarto, *Ekonomi Pancasila:Renungan Satu Tahun PUSTEP UGM*, (Yogyakarta: Aditya Media, 2003), hlm. 1.

Ditambahkan pula bahwa sikap hidup, sistem nilai, dan budaya bangsa Indonesia yang berideologi Pancasila diakui lebih dekat pada aliran ilmu ekonomi sosial yang mementingkan keserasian sosial sebagai tujuan hidup manusia[11]. Pemikiran tersebut salah satu yang melatar belakanginya adalah hasil dari penelitian-penelitian tentang ekonomi kerakyatan yang contohnya di Kabupaten Kutai Barat, bahwa aksi nyata atau praktek ekonomi yang berdasarkan Pancasila sangat mudah ditemukan di lapangan tanpa upaya-upaya yang ekstra keras dan para pelaku ekonomi rakyat tersebut melaksanakannya dengan penuh kesadaran[12]. Pokok-pokok pikiran terkait sistem ekonomi ini dijelaskan lagi dalam misi PUSTEP bahwa sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi pasar yang mengacu secara utuh pada ke-5 sila Pancasila[13].

Sumber primer lain menyebutkan terkait implikasi gagasan tokoh pemikir ekonomi dunia bagi sistem perekonomian yang dikembangkan di Indoensia dan dinyatakan bahwa ilmu ekonomi merupakan ilmu sosial atau ilmu kemasyarakatan yang harus diabdikan untuk kepentingan kemajuan umat manusia[14]. Ditambahkan pula bahwa sistem ekonomi Pancasila memerlukan banyak ahli yang mengkaji dan memberikan sumbangsih pemikiran untuk membuat desain sistem ekonomi Indonesia yang lebih baik dengan berdasarkan pada ideologi Pancasila.

Mubyarto berpendapat dalam bukunya yang lain bahwa teori ekonomi neoklasik yang digunakan selama ini tidak sesuai dengan kondisi ekonomi Indonesia. Sebaliknya teori ekonomi Pancasila merupakan teori asli yang berdasar pada data induktif empirik yang mampu menggambarkan ekonomi

---

[11] *Ibid*, hlm. 11.
[12] *Ibid*, hlm. 10.
[13] *Ibid*, hlm. 19.
[14] Mubyarto, *Gagasan Besar Ekonomi dan Kemajuan Kemanusiaan: Antara Ilmuwan dan Seniman Ekonomi*, (Yogyakarta: Aditya Media, 2004), hlm. 22.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

riil di Indonesia. Tanpa ada penyimpangan dari teori ekonomi pasar[15]. Pemikiran Mubyarto terkait sistem ekonomi Indonesia ini ditegaskan lebih detail lagi dalam buku primer terakhir yang tertulis sebagai berikut: Sistem ekonomi Pancasila merupakan aturan main tentang hubungan-hubungan ekonomi yang mengatur hubungan koordinatif antara manusia satu sama lain dalam kehidupan bermasyarakat dalam usaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan hidup materiil, sosial, maupun moral[16]. Terlihat dari kecenderungan manusia yang menginginkan kehidupan yang sejahtera dan bahagia maka perlu adanya keseimbangan dari pemenuhan ketiga kebutuhan tersebut.

Gagasan Mubyarto yang lain menyebutkan terkait pengertian dari Sistem Ekonomi Kerakyatan[17] adalah Sistem Ekonomi Nasional Indonesia yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan yang sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Pemihakan dan perlindungan ditujukan pada ekonomi rakyat yang sejak zaman penjajahan sampai 57 tahun Indonesia merdeka selalu terpinggirkan. Syarat mutlak berjalannya sistem ekonomi nasional yang berkeadilan sosial adalah berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya.

Pancasila harus terus menerus menjadi pedoman arah perilaku ekonomi bangsa dan warga bangsa, dan menjiwai setiap kebijaksanaan ekonomi yang diambil oleh pemerintah,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[15]Mubyarto, *Teori Ekonomi dan Kemiskinan*, (Yogyakarta: Aditya Media, 2004), hlm. 16.
[16]Mubyarto, *Ekonomi Pancasila: Evaluasi Dua Tahun PUSTEP UGM*, (Yogyakarta: Aditya Media, 2004), hlm. 13.
[17]Mubyarto, dkk., *Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Lembaga Suluh Nusantara, 2014), hlm. 9.

prinsip dari ekonomi kerakyatan menurut Mubyarto, antara lain[18]:

a. Roda kegiatan ekonomi rakyat digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial, dan mora
b. Ada tekad kuat dari seluruh warga bangsa untuk mewujudkan kemerataan sosial, yaitu tidak membiarkan terjadinya dan berkembangnya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan social
c. Nasionalisme ekonomi
   Dalam era globalisasi makin jelas adanya urgensi terwujudnya perekonomian nasional yang kuat, tangguh, dan mandiri
d. Koperasi merupakan sokoguru ekonomi nasional
   Demokrasi ekonomi berdasar kerakyatan dan kekeluargaan; koperasi dan usaha-usaha kooperatif menjiwai perilaku ekonomi perorangan dan masyarakat
e. Ada keseimbangan yang selaras, serasi, dan seimbang dari perencanaan ekonomi nasional dengan pelaksanaannya di daerah-daerah.

Sistem ekonomi kerakyatan yang digagas Mubyarto[19] ditopang oleh lima *platform* (sub sistem) yang membentuk satu kesatuan sistemik yang bersifat holistik. Sila Ketuhanan dan kemanusiaan adalah dasar (landasan) sistemnya, sila persatuan dan kerakyatan merupakan cara (operasionalisasinya) dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan tujuan yang hendak dicapainya. Platform (pilar) tersebut antara lain:

a. Ekonomika Etik
   Ekonomika etik yang mengandung prinsip "roda kegiatan ekonomi bangsa digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral". Awalnya para founding father merumuskan "politik kemakmuran", "keadilan sosial",

[18]Mubyarto, *Ekonomi Rakyat dan Program IDT*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1996), hlm. 1–2.
[19]Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi,* (Yogyakarta: BPFE, 2002), hlm. 30.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

dan pembangunan karakter bangsa yang dilandasi semangat penerapan ajaran moral dan agama. Itu berarti pembangunan ekonomi harus beriringan dengan pembangunan moral atau karakter bangsa dan ditujukan untuk menjamin keadilan antar sesama makhluk ciptaan Allah, tidak sekedar pembangunan materiil semata.

Kondisi ini menegaskan perlunya revolusi moral ekonomi menuju pengejawantahan pilar sistem ekonomi kerakyatan yang digagas Mubyarto yang bermoral dan tidak sekuler. Hal ini ditempuh melalui upaya-upaya serius dan konsisten untuk melakukan penegakan hukum terhadap praktik-praktik ekonomi yang mengabaikan nilai moral dan sosial seperti; pemberantasan korupsi, illegal logging, penyelundupan, perjudian dan pornoaksi[20].

b. Ekonomika Humanistik

Ekonomika humanistik yaitu kemerataan sosial merupakan kehendak kuat warga masyarakat untuk mewujudkan kemerataan sosial, tidak membiarkan terjadi dan berkembangnya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial. Gagasan ini sudah lama tertuang dalam bagian penjelasan Pasal 33 UUD 1945 yang sudah di amandemen dalam konsep kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Akan tetapi ketimpangan sosial-ekonomi hingga saat ini susah diperkecil.

Ekonomika humanistik berfungsi sebagai platform ekonomi yang memperjuangkan pemerataan dan moral kemanusiaan melalui upaya-upaya redistribusi pendapatan, asset, dan kekayaan. Hal ini ditempuh melalui optimalisasi penarikan dan penyaluran zakat dan pajak,

[20]Edy Suandi Hamid, *Sistem Ekonomi,* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2008), hlm. 6.22.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

dan instrumen-instrumen redistribusi pendapatan lainnya[21].

c. Nasionalisme Ekonomi

Nasionalisme ekonomi yaitu nasionalisme ekonomi, bahwa dalam era globalisasi makin jelas adanya urgensi terwujudnya perekonomian nasional yang kuat, tangguh, dan mandiri. Kemandirian bukan saja menjadi cita-cita akhir pembangunan nasional, melainkan juga prinsip yang menjiwai setiap proses pembangunan itu sendiri. Ini mensyaratkan bahwa pembangunan ekonomi harus berdasarkan pada kekuatan lokal dan nasional untuk tidak hanya mencapai nilai tambah ekonomi, melainkan juga nilai tambah sosial-kultural, yaitu peningkatan martabat dan kemandirian bangsa[22].

Pokok perhatian harus diberikan pada upaya pemberdayaan ekonomi rakyat sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Pemerintah tidak perlu ragu melakukan proteksi, seperti halnya terhadap komoditas pertanian, dan menolak agenda-agenda liberalisasi perekonomian jika itu dilakukan untuk mendukung ketahanan ekonomi nasional. Upaya tersebut perlu didukung melalui kampanye intensif penggunaan produk-produk dalam negeri yang berbasis sumber daya ekonomi lokal dan produksi ekonomi rakyat. Privatisasi BUMN strategis harus dihentikan, begitu juga dengan liberalisasi perdagangan (impor) yang merugikan pelaku ekonomi rakyat, khususnya petani dan industri kecil dalam negeri[23].

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[21]Edy Suandi Hamid, *Sistem Ekonomi,* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2008), hlm. 6. 22-23.

[22]Sri Edi Swasono, Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan: Kerakyatan, Nasionalisme dan Kemandirian, (Jakarta: UNJ Press, 2004).

[23]Edy Suandi Hamid, *Sistem Ekonomi,* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2008), hlm. 6. 23.

d. Demokrasi Ekonomi

Demokrasi ekonomi berdasarkan kerakyatan, kekeluargaan: koperasi dan usaha-usaha kooperatif menjiwai perilaku ekonomi perorangan dan masyarakat. Prinsip tersebut dijiwai oleh semangat Pasal 33 UUD 1945 yang kini sudah berganti menjadi UUD 2002 (amandemen keempat). Perubahan tersebut menghilangkan seluruh penjelasan UUD 1945 termasuk penjelasan Pasal 33 yang berisikan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi dan landasan konstitusional koperasi.

Platform ini berusaha mengembalikan hakikat demokrasi ekonomi atau sistem ekonomi kerakyatan dengan ciri "produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat." Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan masyarakat (melalui koperasi) dalam pemilikan faktor-faktor produksi, distribusi, dan konsumsi nasional. Dalam hal ini termasuk peningkatan peranan koperasi dan peranan pekerja dalam kepemilikan saham dan pengambilan keputusan perusahaan[24].

e. Ekonomi Berkeadilan Sosial

Keseimbangan yang selaras, serasi, dan seimbang dari perencanaan ekonomi nasional dengan pelaksanaannya di daerah-daerah, desentralisasi ekonomi dan otonomi yang luas, bebas dan bertanggung jawab, menuju perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan keadilan sosial juga mencakup keadilan antar wilayah (daerah), yang memungkinkan seluruh wilayah di Indonesia berkembang sesuai potensi masing-masing.

Pengamalan konsep ekonomi kerakyatan bila dikaitkan ke dalam sila-sila Pancasila yaitu:

a. Sila pertama Pancasila: ketuhanan menjadi awal permulaan dari gagasan ekonomi kerakyatan, juga

[24] *Ibid,* hlm. 6. 24.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

menjadi tanda bahwa pengejawantahan nilai ketuhanan dalam ekonomi kerakyatan Mubyarto adalah karena Mubyarto menganut agama Islam dengan nilai tauhid menjadi landasan awal dalam setiap perbuatan seorang muslim.

b. Sila kedua Pancasila: nilai kemanusiaan yang sesuai dengan moral dan etika juga menjadi semangat ekonomi kerakyatan yang diusung Mubyarto untuk mencapai kemakmuran rakyat.
c. Sila ketiga Pancasila: adanya persatuan demi terwujudnya ekonomi yang sesuai dengan kultur masyarakat di Indonesia, baik dari rakyat kecil, menengah, atas, hingga pemerintah yang menjamin kestabilan antar masyarakat dalam setiap aktivitas ekonomi.
d. Sila keempat Pancasila: hakikat demokrasi ekonomi atau sistem ekonomi kerakyatan dengan ciri: produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan masyarakat (melalui koperasi) dalam pemilikan faktor-faktor produksi, distribusi, dan konsumsi nasional.
e. Sila kelima Pancasila: Tujuan keadilan sosial juga mencakup keadilan antar wilayah (daerah), yang memungkinkan seluruh wilayah di Indonesia berkembang sesuai potensi masing-masing.

Tokoh lain yang menyatakan bahwa perekonomian Indonesia adalah ekonomi berdasarkan kerakyatan yaitu Sri Edi Swasono, yang merupakan Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, beliau menyebutkan perekonomian Indonesia disusun berdasar falsafah dan ideologi Negara Indonesia, yaitu Pancasila. Perekonomian yang disusun berdasarkan Pancasila adalah Ekonomi Pancasila, yang artinya bahwa perekonomian Indonesia adalah Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pancasila[25]. Beliau merupkan salah satu dari sedikit pakar ekonomi Indonesia yang berani mengatakan bahwa sistem ekonomi Indonesia seharusnya secara mantap disebut dengan Sistem Ekonomi Pancasila[26]. Sri Edi juga menyebutkan bahwa secara ideologis normatif sumber daripada dasar penjabaran ekonomi Pancasila adalah Pancasila itu sendiri, seperti halnya yang dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, juga khususnya pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, selanjutnya pasal-pasal 23, 27 ayat (2), dan 34 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan isi dan dimensi lebih lanjut terkait Ekonomi Pancasila itu sendiri[27]. Sistem Ekonomi Pancasila digali berdasar pemikiran bahwa sistem ekonomi sangat terkait dengan ideologi, sistem nilai, dan sosial budaya (kelembagaan) masyarakat dimana sistem tersebut dikembangkan. Selanjutnya Edy Suandi Tokoh Pembangunan Ekonomi Indonesia yang lainnya juga menjelaskan bahwa Ekonomi Pancasila adalah Sistem Ekonomi yang mengacu pada sila-sila dalam Pancasila, yang terwujud dalam lima landasan ekonomi, yaitu ekonomi moralistik (ber-Ketuhanan), ekonomi kemanusiaan, nasionalisme ekonomi, demokrasi ekonomi (ekonomi kerakyatan yang diarahkan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia)[28].

alaman ke sepuluh dari buku Ekonomi Pancasila Renungan Satu Tahun PUSTEP UGM menyatakan bahwa pelaksanaan ekonomi yang sesuai dengan Pancasila adalah berdasar

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[25]Sri Edi Swasono, Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan: Kerakyatan, Nasionalisme dan Kemandirian, (Jakarta: UNJ Press, 2004), hlm. 152.

[26]Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi,* (Yogyakarta: BPFE, 2000), hlm. 241.

[27]Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi,* (Yogyakarta: BPFE, 2000), hlm. 153.

[28]Edy Suandi Hamid, *Sistem Ekonomi,* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2008), hlm. 6. 20.

kerjasama, bukan ekonomi yang berdasar persaingan bebas[29]. Ditambahkan pula bahwa ekonomi Pancasila sebagai ilmu ekonomi kelembagaan yang mementingkan keserasian sosial sebagai tujuan hidup umat manusia. Sehingga asas kekeluargaan menjadi ciri semangat ekonomi yang hidup dan dipraktekkan dalam kehidupan riil ekonomi rakyat[30]. Lebih tegas lagi dalam misi PUSTEP dijelaskan bahwa jika satu pemerintah kota/kabupaten memiliki program yang mengarah untuk mewujudkan keadilan sosial atau mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur maka bisa dikatakan telah menerapkan sistem ekonomi Pancasila[31].

Penjelasan mengenai ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila ini akan lebih detail dijelaskan dalam buku Teori Ekonomi dan Kemiskinan dalam teori ekonomi kerakyatan yang digagas oleh Mubyarto ini. Selain berdasarkan pada data induktif empirik Indonesia yang tergambar ekonomi riil (*real economic life*), juga tidak menyimpang dari teori ekonomi pasar. Ekonomi Pancasila adalah ekonomi pasar yang berorientasi sepenuhnya pada ekonomi rakyat, ekonomi pasar yang Pancasilais, yang bermoral ketuhanan Yang Maha Esa, bermoral kemanusiaan yang adil dan beradab, bermoral nasionalisme/kebangsaan, bermoral kerakyatan, sepenuhnya diarahkan pada upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia[32].

a. Memiliki semangat bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama
b. Memiliki asas kekeluargaan
c. Memihak pada rakyat miskin
d. Menerapkan praktek ekonomi yang bermoral

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[29]Mubyarto, *Ekonomi Pancasila:Renungan Satu Tahun PUSTEP UGM*, (Yogyakarta: Aditya Media, 2003), hlm. 10.
[30]Mubyarto, *Ekonomi Pancasila:Renungan Satu Tahun PUSTEP UGM*, (Yogyakarta: Aditya Media, 2003), hlm. 11.
[31]*Ibid*, hlm. 19.
[32]Mubyarto, *Teori Ekonomi dan Kemiskinan*, (Yogyakarta: Aditya Media, 2004), hlm. 16.

e. Nasionalistik, bermoral, berasas kerakyatan dan mengarah pada upaya mewujudkan keadilan sosial[33].

Ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila yang telah disebutkan tersebut kemudian disusul dengan langkah kongkrit reformasi kebijakan dalam lima program aksi sebagai berikut[34]:

a. Revolusi cara berpikir dari pembangunan industrialisasi ke pembangunan pertanian dan perdesaan
b. Penghentian privatisasi BUMN dan utang luar negeri dengan mengandalkan pendanaan pembangunan dari sumber pajak dan tabungan dalam negeri
c. Membangkitkan semangat nasionalisme/kebangsaan dalam penyusunan kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi
d. Merubah orientasi pendidikan ekonomi di seluruh perguruan tinggi dan sekolah lanjutan dengan mengajarkan ekonomi Pancasila
e. Menutup peluang KKN dalam penyusunan kebijakan ekonomi, khususnya yang berpihak pada konglomerat.

Ciri ekonomi kerakyatan menurut Prof. Sri Edi Swasono, adalah[35]:

a. Ketuhanan Yang Maha Esa yang artinya ada etika moral yang berasas Ketuhanan, bukan berdasarkan materialisme, tetapi berdasarkan syariah yang telah ditetapkan oleh Allah
b. Kemanusiaan yang adil dan beradab, maksudnya ekonomi yang modern atau ekonomi yang non-Neo-klasikal tidak mengenal kekerasan, penghisaban, ataupun riba'
c. Persatuan berdasar sosio-nasionalisme yang artinya ekonomi berasaskan kebersamaan dan kekeluargaan, gotong royong, bekerja sama dan tidak saling mematikan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[33]Mubyarto, *Teori Ekonomi dan Kemiskinan*, (Yogyakarta: Aditya Media, 2004), hlm. 13.
[34]*Ibid*, hlm. 18.
[35]Mubyarto, dkk., *Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Lembaga Suluh Nusantara, 2014), hlm. 49.

d. Kerakyatan berdasar demokrasi ekonomi, kedaulatan ekonomi, mengutamakan hajat hidup orang banyak, ekonomi rakyat sebagai dasar perekonomian nasional
e. Keadilan sosial secara menyeluruh, artinya kemakmuran rakyat yang utama, bukan kemakmuran orang-seorang, berkeadilan, berkemakmuran

Pembahasan yang ditulis peneliti di atas mengungkapkan terkait munculnya gagasan ekonomi kerakyatan oleh Mubyarto yang lebih spesifiknya dinamai dengan Ekonomi Pancasila. Kemunculan gagasan tersebut tidak lepas dari kecemasan yang timbul dalam diri Mubyarto mengenai sistem ekonomi yang tepat untuk masyarakat Indonesia, disesuaikan dengan permasalahan-permasalahan ekonomi yang ada di seluruh daerah Indonesia, baik itu kondisi kebijakan pemerintahan paska Orde Baru, bangunan pemikiran yang tercetak para pakar ekonomi Indonesia, hingga masalah perekonomian yang dirasakan langsung oleh masyarakat pada saat itu. Walaupun demikian, gagasan Mubyarto terkait ekonomi kerakyatan yang dinamainya dengan Ekonomi Pancasila tersebut masih diperlukan pengembangan agar gagasan tersebut benar-benar mampu dikatakan sebagai salah satu ilmu ekonomi alternatif yang dijadikan pegangan dalam berekonomi oleh masyarakat Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2. Etika Dan Moral Ekonomi Kerakyatan Mubyarto

Pemikiran yang kedua ini terkait etika dan moral ekonomi Pancasila. Walaupun di setiap buku primer dalam penelitian ini tidak secara eksplisit menjelaskan terkait etika dan moral, akan tetapi penjelasan singkat atau kata kunci terkait moral selalu diulang dalam penjelasan-penjelasan singkat. Hal ini bisa dikarenakan sudah terdapat satu buku khusus yang ditulis Mubyarto terkait etika dan moral ekonomi kerakyatan yang digagasnya, sehingga dalam karya-

karya selanjutnya hanya merupakan pengulangan dan penekanan gagasan.

Salah satu tulisan Mubyarto menyebutkan bahwa yang tidak bermoral adalah yang tidak memihak pada rakyat miskin. Menjadi sebuah panggilan sosial dan panggilan moral untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang merupakan tujuan akhir dari Pancasila[36].

Mubyarto juga mengungkapkan bahwa pendalaman dalam setiap ilmu dan pengembangannya perlu mengacu pada ajaran-ajaran Tuhan karena bangsa Indonesia merupakan bangsa yang ber-Ketuhanan. Salah satunya dalam melakukan aktivitas ekonomi dan bisnis yang harus memiliki kesadaran bahwa ilmu ekonomi, jika tetap menganggap diri sebagai bagian atau cabang ilmu sosial dan ilmu moral, maka harus menjaga kehidupan masyarakatnya untuk tetap aman, tentram dan adil bagi semua[37]. Ditambahkan pula bahwa masyarakat Pancasila adalah masyarakat yang bermoral, adil, makmur, dan karta-raharja[38].

Unsur etika atau moral dalam ilmu-ilmu non agama menjadikannya bersifat lebih manusiawi. Seperti halnya ilmu ekonomi yang cenderung bersifat teknis matematis dan membuat gelisah para tokohnya, menimbulkan sebuah gerakan untuk mengembangkan ilmu ekonomika etik atau moral ekonomi, yang mana memberikan tempat penting bagi peranan ilmu etika yang bersumber pada ilmu agama.

Ekonomika etik yang dimaksudkan disini adalah ilmu ekonomi yang tidak mengajarkan keserakahan manusia atas alam benda, tetapi mengajarkan manusia untuk mengatur dan mengendalikan diri. Sehingga dengan kata lain ekonomika etik berbeda dengan ekonomi konvensional, yang

---

[36]Mubyarto, *Teori Ekonomi dan Kemiskinan*, (Yogyakarta: Aditya Media, 2004), hlm. 12.
[37]Mubyarto, *Ekonomi Pancasila: Evaluasi Dua Tahun PUSTEP UGM*, (Yogyakarta: Aditya Media, 2004), hlm. 16.
[38]*Ibid*, hlm. 17.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

mempunyai sifat *homo ekonomikus* dan cenderung serakah, tetapi sebagai manusia etik yang utuh selalu mengendalikan pemenuhan kebutuhan, sampai batas-batas yang pantas dan wajar sesuai dengan ukuran-ukuran sosial dan moral[39].
Selain itu, ekonomika etik juga mengajarkan bahwa hidup manusia tidak terbatas pada hidup yang sekarang dijalani, tetapi juga hidup yang nanti akan dijalani setelah manusia menemui ajalnya, atau hidup di dunia dan di akhirat. Dari gagasan-gagasan tersebut terlihat bahwa penjelasan terkait moral dan etika tidak dijelaskan secara detail, dalam karya Mubyarto, akan tetapi menjadi satu benang merah bila dibahas keseluruhan karya beliau yang berkaitan dengan moral dan juga perlu menengok kembali terkait gagasan utuhnya Mubyarto pada buku moral dan ekonomi yang ditulis jauh sebelum buku-buku primer dalam penelitian ini terbit.

Sri Edi Swasono menyebutkan salah satu garis besar ekonomi Pancasila yang berorientasi pada sila-sila daripada Pancasila, yaitu berorientasi pada etik moral agama, bukan materialisme yang terwujud dalam sila ke-1 Pancasila (Ketuhanan Yang Maha Esa) dan juga sila-sila lainnya, orientasi modernisasi dan tidak mengenal pemerasan atau eksploitasi (kemanusiaan yang adil dan beradab), orientasi persatuan secara kekeluargaan dan kebersamaan, orientasi kerakyatan (demokrasi ekonomi yang mengutamakan ekonomi rakyat dan hajat hidup orang banyak), dan terakhir orientasi keadilan sosial (kemakmuran masyarakat yang utama, bukan kemakmuran orang-seorang).

Pembahasan di atas menunjukkan bahwa sistem ekonomi yang digagas oleh Mubyarto mengutamakan pembangunan manusia dalam aktivitas ekonomi, baik itu aktivitas ekonomi oleh individu maupun dalam kelompok masyarakat yang

[39]Mubyarto, *Ekonomi Pancasila: Evaluasi Dua Tahun PUSTEP UGM*, (Yogyakarta: Aditya Media, 2004), Hlm. 7.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

lebih luas. Harapan besar dalam muatan gagasan ekonomi Pancasila dari Mubyarto ini adalah munculnya sistem ekonomi yang sesuai dan dapat menciptakan rasa kemandirian ekonomi dalam masyarakat, yang tidak hanya mengandalkan fasilitas atau dana dari pemerintah, dan lebih penting lagi bisa memperkecil hingga menghapus kesenjangan antara masyarakat yang berpenghasilan besar dan masyarakat yang berpenghasilan kecil.

3. Implementasi atau Penerapan Ekonomi Kerakyatan Mubyarto

Pemikiran terakhir terkait ekonomi kerakyatan Mubyarto ini masuk dalam ranah aksiologis, dalam salah satu karya Mubyarto memaparkan terkait implementasi atau penerapan dari gagasan ekonomi kerakyatan Mubyarto ini, yaitu pada tanggal 12 Agustus 2002, Mubyarto bekerjasama dengan UGM Yogyakarta mendirikan PUSTEP[40] (Pusat Studi Ekonomi Pancasila), yang kemudian disambut pembentukan Komisi *Ad Hoc* Kajian Ekonomi Pancasila pada Direktorat Jenderal Pendidikan Nasional. Ditambah lagi setelah berdirinya PUSTEP UGM kemudian diikuti pembentukan Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan (PSEK) di Universitas Sarjanawiyata Taman Siswa pada tanggal 16 Agustus 2003[41]. Keseluruhan penerapan gagasan ekonomi kerakyatan Mubyarto ini semata-mata menginginkan penyumbangan teroi-teori dan ilmu ekonomi (yang sesuai dengan kultur Indonesia) yang benar-benar membumi dan memberikan manfaat pada masyarakat/bangsa Indonesia khususnya wong cilik.

Adapun praktek-praktek kehidupan riil dan kegiatan ekonomi rakyat yang mengacu pada sistem (aturan main)

[40]Mubyarto, Revolusi Menuju Sistem Ekonomi Pancasila, (Yogyakarta: Aditya Media dan PUSTEP UGM, 2004), hlm. 20.
[41]Mubyarto, *Revolusi Menuju Sistem Ekonomi Pancasila*, (Yogyakarta: Aditya Media dan PUSTEP UGM, 2004), hlm. 20.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ekonomi Pancasila, seperti salah satu contohnya adalah kehidupan seorang pengemudi spead boat yang bernama Zamrani (umur 26 tahun) yang hanya tamatan SD 6 tahun menegaskan ekonomi Pancasila dalam aksi, yaitu dalam pelayanan jasa transportasi di Sungai Mahakam Kalimantan Timur, yaitu diantara 79 spead boat dan 60 taksi yang semuanya dimiliki warga Kota Bangun. Spead boat tersebut hanya melayani penumpang dari Melak untuk tujuan Kota Bangun pulang-pergi (Kutai Barat dan Kutai Kartanegara), sedangkan taksi kijang dan lain-lain seperti kendaraan mini bus hanya untuk melayani penumpang dari Kota Bangun ke tujuan Tenggarong, Samarinda dan Balikpapan. Bagi-bagi rejeki ala ekonomi rakyat di Kota Bangun ini menjadi bukti nyata telah diterapkannya asas-asas ekonomi Pancasila di Kalimantan Timur[42].

Kota Bangun berada di tengah-tengah antara Melak dan Samarinda yang berjarak darat sekitar 300 km, dan merupakan situs kerajaan kuno Sribangun, Mulawarman. Kondisi kemerataan sosial masyarakat kota Bangun seperti yang dicita-citakan dalam sila ke-2 Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, jelas merupakan gagasan asli masyarakat setempat, yang berkembang di banyak masyarakat lokal di berbagai daerah di Indonesia. Hal tersebut merupakan gagasan orisinil Bung Karno yang menyatakan bahwa Pancasila adalah hasil galian dari gagasan dan pandangan hidup asli masyarakat Indonesia, bukan jiplakan atau khayalan dari budaya luar Indonesia[43]. Akan tetapi mengapa praktek kehidupan riil ekonomi rakyat ini berjalan tersendat-sendat, alasannya karena politik ekonomi yang dijalankan pemerintah terlalu bersifat liberal dan berpihak kepada konglomerat. Saat Krisis Moneter pada tahun 1997-1998, walaupun keberpihakan pemerintah pada

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[42]*Ibid*, Hlm. 21.
[43]Mubyarto, Ekonomi Pancasila Renungan Satu Tahun PUSTEP UGM, (Yogyakarta: PUSTEP UGM, 2003), hlm. 7.

konglomerat belum sepenuhnya hilang, tetapi gerakan ekonomi kerakyatan yang dipicu semangat reformasi memberikan iklim segar pada berkembangnya sistem ekonomi Pancasila yang berpihak pada ekonomi rakyat[44].

Implementasi lainnya adalah adanya program IDT (Impress Desa tertinggal) yang dicanangkan pada tahun 1994-1997. Program Impres Desa Tertinggal (IDT) adalah salah satu program pemerintah yang diluncurkan Mubyarto pada tahun 1993 pada saat menjabat sebagai Asisten Menteri Pembangunan Perencanaan Nasional/Kepala Bappenas, yaitu menghibahkan dana pemerintah kepada kelompok masyarakat secara musyawarah dengan menggunakan konsep dana bergulir. Program IDT ini adalah hasil pemikiran Mubyarto bersama dengan koleganya, misalnya yang tergabung di dalam Yayasan Agro Ekonomika (YAE) seperti sosiolog pedesaan IPB Sayogyo dan Direktur LSM Bima Swadaya Bambang Isnawan. Program IDT sebagai program pengentasan kemiskinan telah berhenti, namun konsep hibah dana bergulir yang dikembangkan oleh Mubyarto dkk sampai sekarang masih digunakan dalam bentuk program-program lain di berbagai sektor pembangunan di Indonesia.

Implementasi yang dilakukan terkait gagasan ekonomi kerakyatan Mubyarto ini juga memperlihatkan peran Negara dalam pembangunan ekonomi Indonesia melalui ekonomi kerakyatan. Sesuai Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34 terkait peran negara dalam sistem ekonomi kerakyatan yang telah dijelaskan di kerangka teori pada bab sebelumnya dan melihat penerapan gagasan ekonomi kerakyatan Mubyarto di Indonesia belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, karena masih digunakannya sistem ekonomi yang tidak sesuai dengan kultur Indonesia, juga konglomerat yang menggunakan hartanya untuk menyuap pemerintah.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[44]Mubyarto, Revolusi Menuju Sistem Ekonomi Pancasila, (Yogyakarta: Aditya Media dan PUSTEP UGM, 2004), hlm. 21.

Ketiga Pernyataan pemikiran Mubyarto terkait ekonomi kerakyatan di atas tersebut ditambah dari hasil wawancara dengan Pak Putut, seorang anggota lembaga PUSTEP UGM yang merupakan lembaga pengembangan pemikiran ekonomi Pancasila Mubyarto, terkait latar belakang munculnya pemikiran ekonomi Pancasila dari Mubyarto, bahwa arus pemikiran ekonomi dunia yang selalu mengarah pada peran Negara dan peran pasar (*State and market driven*), dikotomi tersebut menjadi pemicu Mubyarto dalam menggali peran manusia, sebagai faktor ketiga dalam pembangunan ekonomi alternatif yang sesuai dengan ideologi Indonesia yaitu Pancasila[45].

Pernyataan lain yang memperkuat pendapat peneliti adalah dari wawancara dengan Prof. Edy Suandi Hamid[46], yang merupakan Guru Besar FE UII sekaligus tim peneliti di PUSTEP UGM dan menjadi salah satu orang terdekat Mubyarto. Hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa yang mengawali munculnya gagasan Mubyarto terkait ekonomi Pancasila adalah dari kegelisahan yang muncul atas kondisi ketimpangan ekonomi pada saat itu, sehingga timbul pertanyaan terkait sistem ekonomi yang digunakan di Indonesia, apakah cocok digunakan dan sesuaikah dengan kultur masyarakatnya dan nilai-nilai filsafat Pancasila.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Tabel 3. Ekstrak Bahasan Ekonomi Kerakyatan Mubyarto

No	Kerangka Bahasan	Intisari
1.	Definisi/Hakikat	Perekonomian yang berkeadilan, berdasarkan sistem kepemilikan individu, kolektif sesuai Pancasila dan kultur Indonesia
2.	Asas	Ekonomika Etik

[45]Wawancara dilakukan pada Hari Senin, 29 Mei 2017, pukul 08.00 WIB, bertempat di Kantor PUSTEP UGM Yogyakarta

[46]Wawancara dilakukan pada pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2017, Jam 13.10 WIB bertempat di Kantor Dosen Doktor FE UII, Condong Catur, Yogyakarta.

		Ekonomika Humanistik Nasionalisme Ekonomi Demokrasi Ekonomi Ekonomi Berkeadilan Sosial
3.	Aktualisasi	Keadilan ekonomi serta keberpihakan pada rakyat kecil dan merupakan perwujudan dari sila ke-5 Pancasila dengan sifat moralistik, demokratik, dan mandiri.
4.	Sistem nilai	Nilai Ketuhanan Nilai Kemanusiaan Nilai Persatuan Nilai Kerakyatan Nilai Keadilan
5.	Asumsi Ontologis	Pencapaian manusia secara utuh
6.	Basis Pengembangan secara Epistemologis-metodologis	Menggunakan pendekatan interdisipliner
7.	Basis Pengembangan secara Aksiologis	Bersifat normatif-etis yang berorientasi pada nilai Pancasila menuju keadilan sosial
8.	Contoh Penerapan	Penerapan Inpress Desa Tertinggal tahun 1993-1997, dan mengalami keberhasilan di beberapa daerah, seperti DIY, juga kegagalan, seperti di Irian Jaya

Tiga pikiran penting mengenai ekonomi kerakyatan Mubyarto yang telah dijelaskan di atas, peneliti menetapkan intisari dalam penelitian ini yang telah digambarkan pada tabel 2 di atas. Terkait sistem ekonomi kerakyatan Mubyarto terdapat tiga pokok yang menggambarkan sistem ini, yaitu

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pengamalan seluruh sila-sila dari Pancasila, Sistem sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia dan Negara berperan besar dalam mengatasi ketimpangan di masyarakat. Pokok-pokok tersebut menjadi langkah awal Mubyarto dan orang-orang yang concern dalam ekonomi kerakyatan untuk dapat membakukan ilmu-ilmu ekonomi tentang kehidupan riil dari masyarakat Indonesia.

Terkait etika dan moral ekonomi kerakyatan Mubyarto juga terdapat tiga pokok, yaitu; Keberpihakan pada rakyat miskin, Pengendalian diri dan tidak serakah terhadap alam kebendaan dan Pengejawantahan pencapaian keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketiga pokok tersebut menegaskan bahwa manusia yang berpedoman pada Pancasila merupakan manusia yang bermoral, manusia yang beradab baik dengan sesama dan lingkungan sekitarnya dan juga menghindari perilaku-perilaku yang menyimpang dalam aktivitas ekonominya di masyarakat.

Terkait implementasi atau penerapan ekonomi kerakyatan Mubyarto juga terdapat tiga inti, yaitu; Pembentukan Lembaga yaitu pendirian PUSTEP dan PUSTEK, Pembentukan Program Pemerintah yaitu pembentukan Tim Ad Hoc Kajian Ekonomi Pancasila, IDT dan pailit project di beberapa daerah Indonesia dan Ekonomi Pancasila dalam aksi yaitu kisah bagi rezeki di Kota Bangun Kalimantan Timur. Dari implementasi atau penerapan di atas menjadi jelas bahwa apa yang digagas Mubyarto terkait ekonomi kerakyatan bukan hanya sebuah wacana yang tidak diupayakan dengan maksimal. Kegigihan Mubyarto untuk menjadikan sistem perekonomian Indonesia yang sesuai dengan kultur masyarakatnya menghadapi rintangan yang besar, karena sampai sejauh ini, sistem ekonomi yang berkembang di masyarakat masih menampakkan ketimpangan ekonomi.

Ketiga pokok tersebut dijabarkan dalam delapan bahasan terkait ekonomi kerakyatan yang digagas Mubyarto. Mulai

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

dari latar belakang, pengembangan ilmu dari sisi ontologis, epistemologis, hingga aksiologis. Ekstrak bahasan tersebut kemudian menggambarkan bahwa corak keagamaan, yang dalam hal ini adalah agama Islam, menjadi salah satu peran penting yang mempengaruhi pemikiran ekonomi kerakyatan Mubyarto. Dilihat dari nilai ketuhanan yang menjadi sistem nilai teratas yang dipilih Mubyarto dalam konsep ekonomi kerakyatannya.

C. Pembahasan

1. Ekonomi Kerakyatan Mubyarto Perspektif Etika Ekonomi Islam

Peningkatan spiritual manusia adalah suatu unsur penting dari kesejahteraan manusia dan usaha apapun yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang bertentangan dengan ajaran Islam akan berakhir dengan kegagalan[47]. Pencapaian tujuan berupa *falah* berkaitan erat dengan nilai-nilai yang disebut nilai etika.

Mubyarto seorang pendiri Sistem Ekonomi Pancasila menyebutkan bahwa yang tidak bermoral adalah yang tidak memihak pada rakyat miskin. Menjadi sebuah panggilan sosial dan panggilan moral untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang merupakan tujuan akhir dari Pancasila[48].

Mubyarto dalam ceramahnya terkait moral ekonomi Pancasila menyatakan bahwa banyak ahli ekonomi Indonesia yang menganggap bahwa sistem ekonomi Pancasila hanya sebuah impian belaka, ditambahkan pula bahwa syarat untuk mengembangkan sistem ekonomi Pancasila salah satunya

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[47]Umer Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 6.

[48]Mubyarto, *Teori Ekonomi dan Kemiskinan*, (Yogyakarta: Aditya Media, 2004), hlm. 12.

adalah bahwa ajaran-ajaran agama yang relevan dengan kehidupan ekonomi sehari-hari harus terus menerus ditanamkan pada setiap orang dan pelaku ekonomi baik sebagai produsen maupun konsumen. Dari itu Mubyarto menekankan pentingnya peranan dari para pemikir ekonomi, serta pemikir dan pemimpin keagamaan dalam pengembangan sistem ekonomi Pancasila.

Bangsa Indonesia yang berideologi pada Pancasila menjadikannya sebagai nilai-nilai dasar landasan kehidupan, yang membuatnya percaya bahwa moral kehidupan ekonominya berlandaskan moral Pancasila. Di Indonesia juga diakui eksistensi dan hak hidup beberapa agama besar (Pasal 29 ayat 2 UUD 1945), nilai-nilai yang dikembangkan berasal dari berbagai agama termasuk nilai-nilai adat asli bangsa Indonesia yang berasal dari berbagai suku bangsa, termasuk nilai dari ajaran Islam yang mengedepankan etika dan moral.

Moral Ekonomi Kerakyatan yang dinamai Ekonomi Pancasila sebagai Sistem Ekonomi yang berplatform (pilar) oleh Mubyarto, yaitu[49]:

a. Moral agama
   Artinya pembangunan ekonomi harus beriringan dengan pembangunan moral atau karakter bangsa dan ditujukan untuk menjamin keadilan antar sesama makhluk ciptaan Allah SWT, bukan hanya sekedar pembangunan materil.
b. Moral kemerataan sosial
   Yaitu kehendak kuat warga masyarakat untuk mewujudkan kemerataan sosial, tidak membiarkan ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial terjadi dimana-mana.
c. Moral nasionalisme ekonomi
   Bahwa dalam era globalisasi makin jelas adanya urgensi terwujudnya perekonomian nasional yang tangguh, kuat dan mandiri. Sesuai dengan konsep *founding fathers*

[49]Mubyarto, *Ekonomi Pancasila*, (Yogyakarta: BPFE UGM, 1981).

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

(Soekarno dan Hatta) politik-ekonomi berdikari, yang bersendikan usaha mandiri (*self-help),* percaya diri *(self-reliance)* dan pilihan politik luar negeri yang bebas aktif.

d. Moral kerakyatan

Bahwa seharusnya koperasi dan usaha-usaha kooperatif menjiwai perilaku ekonomi perorangan dan masyarakat. Sementara kenyataan di lapangan, upaya penegakan demokrasi ekonomi dihadapkan dengan upaya-upaya untuk memperjuangkan pasar bebas, yang menjadi senjata penganut liberalism dan kapitalisme. Contoh: privatisasi BUMN dan Liberalisasi impor.

e. Moral keadilan sosial

Keseimbangan yang harmonis, efisien dan adil antara perencanaan nasional dengan desentralisasi ekonomi dan otonomi yang luas, bebas dan bertanggung jawab menuju perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Poin moral yang bersumber dari pilar ekonomi kerakyatan Mubyarto di atas menunjukkan keseriusan Mubyarto dalam menanggapi masalah ekonomi yang berkaitan dengan moral berekonomi. Etika merupakan pedoman moral bagi suatu tindakan manusia dan menjadi sumber pemikiran baik dan buruk tindakan itu[50]. Dalam hal ini agama menjadi kepercayaan sebuah kekuatan supra natural yang mengatur.

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam etika ekonomi Islam bila dihubungkan dengan muatan ekonomi Pancasila yang digagas Mubyarto memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan, yaitu antara lain:

a. Semangat ekonomi Pancasila yang tertuang dalam sila-sila Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan nilai-nilai moral dalam Islam. Sehingga unsur kesatuan (tauhid) menjadi bagian yang tak terpisahkan, seperti yang bisa dilihat dalam sila

[50]Mubyarto, *Ekonomi Pancasila*, (Yogyakarta: BPFE UGM, 1981), Hlm. 7.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

pertama dari Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.

b. Sedangkan sila kedua yaitu Kemanusiaan yang beradab, Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan merupakan sila yang mengandung prinsip kebenaran, kehendak bebas, kemanfaatan, kebolehan dan pertanggung jawaban dalam setiap pointnya.
c. Sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan prinsip etika Islam yaitu keadilan.
d. Prinsip dari etika ekonomi Islam yang tidak secara eksplisit terdapat dalam muatan ekonomi Pancasila adalah keharaman riba.

Ekonomika etik pada dasarnya harus mengajarkan landasan moral dalam membangun teori untuk menjelaskan tingkah laku individu, kelompok, perusahaan, unit pemerintah dan negara dalam mencapai tujuan. Karena persoalan ekonomi adalah persoalan perbuatan manusia untuk manusia (mu'amalat), maka harus mempunyai ciri universalitas. Sehingga pada dasarnya berbagai bentuk landasan etik yang telah disepakati dalam forum internasional dapat menjadi pedoman. Sebagai contoh kesepakatan-kesepakatan dalam *World Conference on Development* dan komitmen pemenuhan fundamental *human right*.

Pembahasan terkait ekonomi Pancasila yang digagas Mubyarto dari perspektif ekonomi Islam mengarah pada sejauhmana kesesuaian konsep ekonomi dari Mubyarto dengan konsep Islam. Dilihat dari sejarah pembentukan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang dicetuskan oleh Mohammad Hatta, terlihat jelas bahwa ajaran Islam menjadi landasan dalam merumuskannya. Sehingga nilai-

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

nilai dari ajaran Islam termasuk dalam gagasan ekonomi Pancasila.

Sesuai dengan bahasan dalam ekstrak ekonomi kerakyatan yang telah dijelaskan sebelumnya, keadilan sosial menjadi tujuan digagasnya ekonomi kerakyatan yang juga sesuai dengan sila ke lima dari Pancasila, walaupun begitu sila-sila Pancasila yang lainnya tidak menjadi bagian terpisah, akan tetapi saling berhubungan hingga terwujudnya sebuah keadilan sosial, yang terdapat dalam table ekstrak poin aktualisasi dan pengembangan aksiologis. Sama halnya dalam etika ekonomi Islam, yang salah satu prinsipnya adalah terbentuknya keadilan, maka ekonomi kerakyatan yang digagas Mubyarto dengan ekonomi Islam mempunyai kesamaan dalam hal perwujudan keadilan.

Seperti halnya yang dijelaskan Imam Gazali[51] dalam bukunya Ihya' 'Ulum Ad-Din Al Mustaṣfa' fi 'Ilmi Al-Uṣul dengan pemikiran sosio-ekonominya yang disebut dengan fungsi kesejahteraan sosial Islami, bahwa kesejahteraan yang disebut dengan maslahah dari suatu masyarakat tergantung pada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yaitu agama (*ad-Din*), jiwa (*An-Nafs*), akal (*Al-aql*), keturunan (*An-Nasl*) dan harta (*al-Maal*). Al-Gazali memandang bahwa pertumbuhan ekonomi sebagai bagian dari tugas-tugas kewajiban sosial yang sifatnya fardhu kifayah yang sudah ditetapkan Allah. Artinya jika tidak terpenuhi, maka kehidupan dunia akan runtuh dan kemanusiaan akan binasa. Gazali menegaskan bahwa aktivitas ekonomi harus dilakukan secara efisien karena merupakan bagian dari pemenuhan tugas keagamaan seseorang[52].

Berdasarkan pendapat Gazali tersebut gagasan ekonomi kerakyatan dari perspektif etika ekonomi Islam terdapat kesamaan pikiran dari ketiganya bahwa aktivitas sosial

[51]Gazali, *Ihya' 'Ulum Ad-Din Al Mustaṣfa' fi 'Ilmi Al-Uṣul*, Juz 2, (Beirut: Daar al-Fiqr, 1980).
[52]Gazali, *Mizan al-'Amal*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1989).

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

seperti ekonomi harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, tanpa melebihkan suatu golongan ekonomi tertentu, yang terpenting adalah pemenuhan kebutuhan hidup yang terpenuhi dengan baik, selain itu juga terkait penerapan dalam ekonomi Islam dan ekonomi kerakyatan Mubyarto yang tidak mungkin diterapkan dari teks ke konteks, melainkan harus sesuai dengan kultur masyarakat, yang membuat ekonomi Islam dan ekonomi kerakyatan Mubyarto mempunyai kesamaan pemikiran.

Pendapat ini dibenarkan oleh Pak Putut[53], selaku anggota lembaga PUSTEP UGM yang menyatakan bahwa dalam batang tubuh Undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila tercermin gagasan ekonomi Islam. Termasuk salah satu nilai kesamaannya adalah bahwa syariat dalam Islam mendudukkan harta (maal) dan aktivitas ekonomi tidak dalam keserakahan, dan begitu juga dengan ekonomi Pancasila yang menginginkan penghapusan keserakahan dari segelintir orang yang berpenghasilan tinggi di Indonesia. Terutama melihat sejarah keberhasilan perkumpulan dagang Islam di Indonesia yang dinamai Sarekat Islam atau Sarekat Dagang Islam menjadi potret baik yang perlu diulang kembali di masa ini.

Wawancara dengan Prof. Edy Suandi Hamid[54] menyatakan bahwa bila ekonomi Pancasila dipandang dari sudut etika ekonomi Islam, jelas bahwa setiap point gagasan dari ekonomi Pancasila bersumber dari sila-sila Pancasila yang dicetuskan oleh Mohammad Hatta. Dari sila ketuhanan, sila kemanusiaan, sila demokrasi/kerakyatan dan terakhir sila keadilan menunjukkan bahwa moral dan etika ekonomi Pancasila tidak ada yang menyimpang dari etika ekonomi Islam. Karena nilai-nilai dalam gagasan Mubyarto ingin

[53]Wawancara dilakukan pada Hari Senin, 29 Mei 2017, pukul 08.00 WIB, bertempat di Kantor PUSTEP UGM Yogyakarta.

[54]Wawancara dilakukan pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2017, Jam 13.10 WIB bertempat di Kantor Dosen Doktor FE UII, Condong Catur, Yogyakarta.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

menjauhkan diri dari adanya ketimpangan, adanya ketidak adilan, dan berbagai perilaku amoral lainnya dalam melakukan aktivitas ekonomi. Itu sama halnya dengan tujuan dari etika ekonomi Islam yang sangat menolak adanya sifat keserakahan akan harta.

2. Kontribusi Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mubyarto terhadap Pembangunan Keadilan Ekonomi Daerah Di Indonesia

Mubyarto berpendapat bahwa dengan cita-cita ideal bangsa Indonesia dalam demokrasi ekonomi yang terdapat di penjelasan Pasal 33 UUD 1945:

Produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

Selain Pasal 33, penegasan dilakukan dalam TAP MPR No. XVI/1998 yang secara kongkrit mengupayakan untuk melibatkan secara aktif seluruh masyarakat dalam proses produksi dan penikmatan hasil produksi tersebut, yaitu dalam peranan faktor produksi tanah, modal, dan tenaga kerja. Dari situlah, maka tugas kita sebagai warga Negara Indonesia untuk mewujudkan asas kerakyatan dalam pelaksanaan program pemerintah di daerah-daerah seluruh penjuru Indonesia tanpa terkecuali. Tentu saja asas desentralisasi harus melengkapi asas kerakyatan agar ekonomi rakyat di daerah-daerah benar-benar memperoleh peluang untuk berkembang.

Saat itu sekitar tahun 1997, ketika ketahanan ekonomi rakyat masih lemah, terkhusus dalam menghadapi proses pembangunan menuju ke modernisasi dan industrialisasi,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

para pelaku ekonomi rakyat harus berusaha mengembangkan jaringan lembaga-lembaga pengaman sosial secara bersama-sama, baik dalam bentuk arisan-arisan, atau koperasi simpan pinjam (kospin). Bank-bank plecit di pasar-pasar rakyat merupakan jalan keluar bagi permodalan ekonomi rakyat. Program seperti IDT, Takesra/Kukesra, atau P4K dalam bidang pertanian, terbukti membantu masyarakat daerah dalam pemenuhan kebutuhan terkait perkreditan kecil.

Pemberdayaan untuk ekonomi rakyat merupakan kebijakan dan program yang telah lama dikembangkan pemerintah guna membantu ekonomi rakyat sebagai kegiatan produksi, bukan kegiatan konsumsi. Bertujuan jelas untuk pemenuhan kebutuhan permodalan/perkreditan kecil yang mudah dan murah tanpa jaminan fisik, seperti halnya Perum Gadai.

Mubyarto menggagas program IDT (Impres Desa Tertinggal) sebagai upaya kongkrit pemberdayaan ekonomi rakyat berupa bantuan modal pada kelompok masyarakat (pokmas) disertai pendampingan. Program IDT merupakan salah satu upaya pemerintah sesuai dengan InPres No. 5/1993 untuk menerapkan startegi pembangunan yang berkelanjutan, karena hanya di awal program saja yang merupakan program pemerintah. Setelah program diterima dengan baik oleh masyarakat/penduduk miskin, maka selanjutnya diselenggarakan sepenuhnya oleh masyarakat sendiri dan berhasil atau tidaknya dan bermanfaat atau tidaknya merupakan gerakan masyarakat dan menjadi tanggung jawab masyarakat itu sendiri.

Program IDT yang dicanangkan oleh Mubyarto ini berhasil dilakukan sesuai konsep/filsafat dasarnya adalah di daerah Yogyakarta dan Bali, keberhasilan tersebut salah satu pendukung terbesarnya adalah karena adanya pengaruh lembaga-lembaga adat yang kuat dan mapan. Dan mengalami kegagalan di daerah Kalimantan Barat, Maluku dan Irian Jaya, yang salah satu faktornya karena kesulitan dan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

kelambanan penduduk miskin dalam memahami dan melaksanakan program IDT tersebut. . Peningkatan program IDT harus direvitalisasi karena di banyak daerah masih berjalan dan modalnya bergulir dengan baik[55].

Program IDT ini berjalan selama kurang lebih 4 tahun, dari tahun 1993-1997, sebelum terjadinya krisis moneter dan berhenti total setelah terjadinya krisis moneter. Selain program IDT yang bukan merupakan kerja individu dari Mubyarto, melainkan kerja tim dengan lembaga pemerintah dan ekonom Indonsia yang concern pada masalah ekonomi kerakyatan, mubyarto dan teman-temannya menjalankan program economy research di beberapa daerah di Indonesia dengan bantuan dari pemerintah daerah setempat. Kegiatan penelitian tersebut bertujuan untuk mengaktualisasikan gagasan ekonomi Pancasila, baik di ranah kegiatan ekonomi maupun ranah pendidukan.

Pendapat peneliti ini dikuatkan dengan pernyataan dari anggota lembaga PUSTEP UGM[56] yang menyatakan bahwa program IDT (Impres Desa Tertinggal) menjadi bentuk kongkrit dari gagasan ekonomi Pancasila yang digagas Mubyarto dan dilaksanakan bersama dengan tim nya pada saat itu dan dukungan dari pemerintah. Akan tetapi keberhasilan dari program tersebut sifatnya temporal, apalagi secara sistemik ekonomi Indonesia masih menggunakan ekonomi pasar.

Kemudian Prof Edy[57] juga menyatakan bahwa ekonomi Pancasila masih jauh dikatakan berhasil, karena sifatnya yang masih harus terus berkembang, untuk menyesuaikan konsep ekonomi Pancasila dengan kondisi alami masyarakat

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[55]Mubyarto, *Kembali ke Ekonomi Pancasila*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1998), hlm. 75.

[56]Wawancara dilakukan pada Hari Senin, 29 Mei 2017, pukul 08.00 WIB, bertempat di Kantor PUSTEP UGM Yogyakarta.

[57] Wawancara dilakukan pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2017, Jam 13.10 WIB bertempat di Kantor Dosen Doktor FE UII, Condong Catur, Yogyakarta.

Indonesia saat beraktivitas dalam hal ekonomi dan juga dalam pengajaran pendidikan ekonomi di seluruh lembaga pendidikan fomal di Indonesia. Maka dari itu perlu upaya-upaya yang konsisten dilakukan agar sistem ekonomi Indonesia ini sesuai dengan ideologi bangsa dan juga sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Seperti yang diusahakan Mubyarto dan kawan-kawannya sampai sebelum Mubyarto meninggal tahun 2005 lewat pailit project di beberapa daerah di Indonesia, seperti di derah Kutai Barat.

Pemberdayaan untuk ekonomi rakyat harus dilaksanakan bersinergi antara pemerintah dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan dunia perbankan. Pengembangan ekonomi rakyat dan sekaligus program untuk membantu mempercepat penghapusan kemiskinan merupakan bentuk operasionalisasi dari sistem ekonomi Pancasila. Apalagi Indonesia merupakan Negara yang besar dan wilayahnya luas, sehingga otomatis mempunyai perekonomian yang beragam pula, baik dalam ciri-cirinya maupun dalam penampilannya.

Di zaman kolonial, terdapat pembedaan perekonomian antara Jawa dan luar Jawa. Jawa dinilai mempunyai penduduk yang padat dan sarana prasarana ekonomi dan sosial yang relatif berkembang. Dan luar Jawa dinilai sebagai tanah-tanah kosong, hutan belantara, wilayah yang terisolasi yang menunggu bantuan modal untuk mengembangkannya.

Setelah kemerdekaan, Jawa menjadi pusat Negara dan pusat pemerintahan yang dalam hal ekonomi dan sosial berkembang lebih cepat lagi, termasuk bidang pendidikan, perdagangan dan industri, sehingga mengakibatkan ketimpangan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa. Gambaran perkembangan perekonomian daerah yang bermacam-macam dan timbul ketimpangan ini yang menjadi salah satu masalah perekonomian nasional dalam perjalanan panjang menuju keadilan ekonomi daerah di Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Sehingga pemecahan masalahnya memerlukan kebijakan yang didasarkan pada studi-studi serius dan mendalam.

Keadilan ekonomi bila tercipta akan lebih memperpendek jalan Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, dan kesejahteraan ini menjadi tugas pokok dari pemerintah. Seperti halnya dalam Islam, terdapat kaidah fiqh yang menyatakan tentang tugas pokok Negara/pemerintahan dalam Islam, yaitu:

Tasarruf al-imam ala ar-ra'iyyat manutun bi al-maslahah[58], atau

At-Tasarruf 'ala ar-raiyyah manutun bil maslahah[59], dengan arti yaitu:
"Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada maslahah."

Berdasarkan dua kaidah tersebut dapat dipahami bahwa tugas pokok Negara atau pemerintahan dalam Islam adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Maka dari itu pemerintah yang menjabat di Negara Indonesia ini harus mampu mengarahkan kebijakan pada pencapaian kesejahteraan rakyat, seperti halnya dalam kaidah Islam di atas, dengan bersinergi dengan pihak-pihak terkait, termasuk masyarakat di seluruh Indonesia.

Kehidupan manusia tidak akan damai bila hanya mengurusi kebutuhan materi saja yang bisa tepenuhi. Ada kebutuhan spiritual yang bagi masyarakat Indonesia sama pentingnya dengan kebutuhan materi. Itu mengapa GBHN (Garis Besar Haluan Negara) menyebutkan bahwa

---

[58]Jalaluddin as-Suyuti, al-asybah wa an-Nazair fi al-Furu', (Beirut: Daar al-Fikr, tanpa tahun), hlm. 83, Ibn Nujaim, al-Asybah wa an-Nazair Ala Mazahib Abi Hanifah, an-Nu'man, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiah, 1993), hlm. 123 .
[59]Ahmad ibn Muhammad az-Zarqa, Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyah, (Damaskus: Daar al-Qalam, 1989), hlm. 309.

pembangunan Indonesia adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, yang memperoleh keseimbangan antara kebutuhan materiil dan spiritualnya, walaupun hanya kebutuhan materiilnya saja yang bisa diukur secara kuantitatif.

Hal ini sesuai dengan tujuan pembentukan pembentukan pemerintah Negara Indonesia dalam pembukaan UUD 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sementara itu, ideology Pancasila yang tercantum dalam bagian akhir pembukaan UUD 1945 yang merupakan dasar penyelenggaraan Negara Indonesia dengan tujuan akhirnya yang terdapat dalam sila kelima, yaitu mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan keadilan sosial sendiri menyangkut keadaan perasaan batin, yaitu rasa tentram dan rasa aman karena seluruh anggota masyarakat mematuhi aturan main yang sesuai dengan etika dalam hubungan-hubungan ekonomi.

Akhirnya yang dianggap paling cocok pada saat ini bagi sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi pasar, akan tetapi harus bisa menghindari berbagai ciri negatifnya. Ditinjau dari segi etika dan moral, sistem ekonomi Indonesia yang berdasar Pancasila harus menjadi prinsip dasar yang diterima terlebih dahulu. Bila prinsip dasar sudah diterima, maka para ahli ilmu sosial, terutama ahli ekonominya harus mampu mengembangkan teori atau model operasional yang bisa menjadi pedoman kebijakan. Seluruh kegiatan manusia Pancasila harus utuh yaitu menggabungkan berbagai macam motivasi yaitu, motivasi ekonomi, sosial, dan moral, dan cita-cita mewujudkan keadilan sosial dan khususnya keadilan ekonomi dapat tercapai di Negara Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

D. Preskripsi dan Refleksi Kritis

Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasar pada etika atau ekonomi etik, dalam penerapannya tidak mungkin langsung dari teks ke konteks, akan tetapi harus disesuaikan dengan kultur masyarakat yang ada dalam wilayah tersebut. Maka dari itu pengembangan ekonomi Islam di Indonesia patut belajar dari cara berfikir Mubyarto dalam menggagas ekonomi kerakyatan, termasuk menyesuaikan kultur masyarakat Indonesia dan mewujudkan ekonomi yang berkeadilan. Sehingga masalah etika, moral, dan kultur masyarakat menjadi bahan pertimbangan penting dalam pengembangan ekonomi Islam, khususnya di Indonesia.

Konsep ekonomi kerakyatan yang digagas oleh Mubyarto pada masanya memberikan dampak dalam pengembangan wilayah keilmuan para pemikir ekonomi di Indonesia. Gagasan kritis terhadap ekonomi neoklasik yang digunakan di ranah pendidikan dan praktek ekonomi menjadi tambahan daftar ketidaksesuaian sistem ekonomi neoklasik tersebut bila diterapkan di Indonesia. Pada saat sekarang pun, ekonomi yang berdasarkan Pancasila mulai digaungkan kembali, seperti juga yang dikatakan Prof Edy Suandi dalam wawancara, bahwa akan terus diperjuangkan sebuah sistem ekonomi yang sesuai dengan ideologi Negara Indonesia dan sesuai dengan kultur masyarakatnya yang majemuk dan tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Jelas bahwa pegiat ekonomi kerakyatan yang digagas oleh Mubyarto berusaha mencari jalan dan peluang agar nilai-nilai yang terkandung dalam ekonomi kerakyatan terejawantahkan dalam setiap rancangan ekonomi Indonesia dan juga dalam setiap aktivitas ekonomi di Indonesia.

Ekonomi Islam yang sedang berkembang di Indonesia ini tentu tidak lepas dari melihat kenyataan atau realitas yang terjadi antara orang miskin dan orang kaya yang semakin merajalela di Indonesia, ditambah lagi dengan pasar bebas yang sudah mulai masuk ke wilayah Indonesia. Sebagai sistem ekonomi alternatif,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ekonomi Islam di Indonesia menjadi pilihan yang baik dan mampu bersaing, walaupun masih diperlukan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi tinggi di bidang ekonomi Islam untuk mengembangkan produk di lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip *syari'ah* dan juga lulusan dari perguruan tinggi yang kompatibel dan menguasai ilmu ekonomi Islam.

Termasuk dalam sejarah perkembangan ekonomi kerakyatan yang digagas Mubyarto dan juga implementasinya, ekonomi alternatif harus mampu bersaing dengan sistem ekonomi yang sedang berlaku di Indonesia, dan harus mampu mengurai kesenjangan ekonomi yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Terutama perlunya membangun kerjasama yang baik dengan pemerintahan yang sedang memimpin negara Indnesia, sehingga nilai-nilai dalam ekonomi alternatif bisa dimasukkan ke dalam kebijakan pemerintah. Contohnya dalam penerapan program IDT dan pelaksanaan *pilot project* oleh para pegiat ekonomi kerakyatan yang merupakan hasil kerjasama dengan pemerintahan yang terkait. Walaupun dalam pelaksanaannya, program IDT harus terhenti karena Indonesia mengalami krisis moneter.

Gagasan inti yang termuat dari ekonomi kerakyatan Mubyarto ini jelas mempunyai nilai-nilai yang sama dalam ekonomi Islam dan mampu menjadi salah satu cara dalam membumikan ekonomi Islam di Indonesia. Dan diharapkan ekonomi Islam dapat berkembang sesuai dengan prinsip *syari'ah* dan tercapai keadilan ekonomi seluruh masyarakat di Indonesia. Termasuk didalamnya penerapan seluruh sila Pancasila yang dimasukkan di setiap konsep dan pelaksanaannya menjadi bagian dari perwujudan nilai inti ekonomi kerakyatan yang digagas oleh Mubyarto.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang telah diuraikan secara keseluruhan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Esensi ekonomi kerakyatan yang digagas oleh Mubyarto adalah ekonomi yang berkeadilan dan diinspirasi sebagai ekonomi etik. Dengan sifat moral dan etika tersebut gagasan ekonomi kerakyatan Mubyarto sesuai dengan etika ekonomi Islam.
2. Kontribusi kongkrit atas pemikiran ekonomi Mubyarto dalam pembangunan keadilan ekonomi daerah di Indonesia ini terdiri dari:
   a. Kontribusi Akademis
      Pengembangan ekonomi di Indonesia harus berkeadilan dan dilandaskan dengan etika transedental di setiap pikiran-pikiran para ekonom Indonesia.
   b. Kontribusi Praksis
      Lembaga yang dibuat khusus terkait pengembangan ekonomi kerakyatan, seperti PUSTEP (Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan) UGM terus mengupayakan adanya elaborasi nilai-nilai dalam gagasan ekonomi kerakyatan dengan lembaga keuangan yang ada di Indonesia, seperti lembaga keuangan syariah, dan lainnya untuk bisa bersinergi dalam membangun keadilan dalam aktivitas ekonomi daerah di Indonesia. Setiap upaya praksis yang dilakukan dengan sistem ekonomi apapun, bila disesuaikan dengan kultur masyarakatnya dan juga tidak meninggalkan semangat keagamaan maka akan menuai keberhasilan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

B. Rekomendasi

Setelah penulis melakukan kajian terhadap pemikiran Mubyarto mengenai konsep ekonomi Pancasila dan kontribusi pemikirannya, maka menurut penulis ada beberapa hal yang perlu ditindak lanjuti, diantaranya:

Pertama, penelitian ini menuntut adanya penelitian lanjutan yang lebih mendalam untuk melakukan pengembangan terkait ekonomi Islam yang mendialogkan atau mempertautkannya dengan sistem ekonomi yang sedang berjalan atau berkembang, seperti di Indonesia. Saran ini didasarkan pada asumsi dasar bahwa dengan landasan konseptual yang hanya terdapat beberapa perbedaan sudut pandang, konsep etika ekonomi dari beberapa tokoh ekonomi yang *concern* dalam hal ekonomi kerakyatan memiliki pertemuan pandangan dan bisa dijadikan acuan bagi sebuah perekonomian Indonesia yang berdasarkan etika dan moral.

Kedua, konsep keadilan dalam pembangunan ekonomi masih banyak menyimpan hal-hal yang perlu dikaji lebih jauh sebagai upaya reinterpretasi etika ekonomi yang sesuai dengan masa kini dan mendatang. Oleh karena itu, hasil penelitian yang penulis lakukan ini masih terbuka untuk dikaji ulang dan dikembangkan dengan memakai pendekatan dan tolak ukur yang berbeda, seperti membahas konsep-konsep keadilan secara mandalam dan lainnya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, Anwar., 2008, "Pemikiran Ekonomi Mohammad Hatta Ditinjau dari Perspektif Islam", *Disertasi Doktor*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Amalia, Euis., 2008, "Reformasi Kebijakan bagi Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia (Analisis Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam)", *Disertasi Doktor*.

Arif, Agus., 2005, *Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Baswir, Revrisond., 2009, *Ekonomi Kerakyatan vs. Neoliberalisme*, Yogyakarta: Tim Ahli Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM.

Bungin, B., 2003, *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta: Raja Afindo.

Chander, Daniel., 2002, *The Semiotics: the Basics*, London: Routlegde.

Chapra, Umer., 2000, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani Press.

Dalimunthe, Rita F., 2004, *Etika Ekonomi. Dalam Website Google: Etika Ekonomi dan Pengembangan Iptek.*

Departemen Agama RI, 2008, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro.

Dimyati, Ahmad., 2007, "Ekonomi Etis; Paradigma Baru Ekonomi Islam", *Jurnal La-Riba*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol I, No. 2, Bulan Desember 2007.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Ghazali, Abu Hamid., 1980, *Ihya' 'Ulum Ad-Din Al Mustashfa' min 'Ilmi Al-Ushul*, Juz 2, *Dar al-Fikr Lithibaati Wa an-Nashr Wa Tausi'*, Beirut: Daar al-Fiqr.

-------, 1989, *Mizan al-Amal*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Hamid, Edy Suandi., 2006, *Ekonomi Indonesia dari Sentralisasi ke Desentralisasi*, Yogyakarta: UII Press.

-------, 2008, *Sistem Ekonomi,* Jakarta: Universitas Terbuka.

Hamka, 1997, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas.

Hastangka, 2012, "Filsafat Ekonomi Pancasila Mubyarto", *Jurnal Filsafat*, Vol 22, No. 1, April 2012, Yogyakarta: Fakultas Filsafat Universitas Gajah Mada Yogyakarta.

Ismanto, Kuat., 2009, *Manajemen Syari'ah Impelementasi TQM Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Junus, Umar., 1985, *Resepsi Sastra: Sebuah Pengantar*, Jakarta: Gramedia.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka.

Rahmatina Kasri, Habib Ahmed, 2015, "*Assesing Socio-Economic Development based on Maqasid al-Shariah Principles: Normative Frameworks, Methods and Implementation in Indonesia*", *Islamic Economic Studies*, Vol. 23, No. 1, Mei.

Lindayanti, Wiwin., 2007, "Sistem Ekonomi Islam dan Sistem Ekonomi Pancasila (Studi Perbandingan Pandangan M. Umer Chapra dan Mubyarto", *Tesis Pascasarjana*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Noor, Ruslan Abdul Ghofur., 2012, "Kebijakan distribusi Ekonomi Islam dalam Membangun Keadilan Ekonomi Indonesia", *Jurnal Islamica*, Vol. 6 No. 2, Maret.

Nujaim, Ibn., 1993, *al-Asybah wa an-Nazair Ala Mazahib Abi Hanifah, an-Nu'man*, Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiah.

Nuruddin, Amiur., 1994, "Konsep Keadilan dalam Al-Qur'an dan Implikasinya pada Tanggung Jawab Moral", *Disertasi Doktor*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

MacPherson, 1985, *The Rice and Fall of Economic Justice*, Oxford, op. cit.

Mafruhah, Izza., 2002, "Membumikan Konsep Syariah dalam Ekonomi Berbasis Kerakyatan (Baitul Maal Wat Tamwil Sebagai Sebuah Solusi)", *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 3, No. 2, Desember.

Miles,M.B, Huberman,A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.

Moeloeng, Lexy J., 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet XI, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mubyarto, 1981, *Ekonomi Pancasila*, Yogyakarta: BPFE UGM.

-------, 1988, *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*, Jakarta: LP3ES.

-------, 1993, *Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan*, Jakarta: Pustaka LP3ES.

-------, 1996, *Ekonomi Rakyat dan Program IDT*, Yogyakarta: Aditya Media.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

-------, 1997, *Ekonomi Pancasila: Lintasan Pemikiran Mubyarto*, Yogyakarta: Aditya Media.

-------, 1998, *Kembali ke Ekonomi Pancasila: Pemerataan Pembangunan dan Penanggulangan Kemiskinan*, Yogyakarta: Aditya Media.

-------, 2000, *Membangun Sistem Ekonomi,* Yogyakarta: BPFE.

-------, 2001, "Penanggulangan Kemiskinan dalam Era Otonomi Daerah", *Jurnal UNISIA,* No. 43/XXIV/I/2001, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

-------, 2003, *Ekonomi Pancasila: Renungan Satu Tahun PUSTEP UGM*, Yogyakarta: PUSTEP UGM.

-------, 2004, *Ekonomi Pancasila: Evaluasi Dua Tahun PUSTEP UGM*, Yogyakarta: Aditya Media dan PUSTEP UGM.

-------, 2004, *Teori Ekonomi dan Kemiskinan*, Yogyakarta: Aditya Media.

-------, 2004, *Revolusi Menuju Sistem Ekonomi Pancasila*, Yogyakarta: Aditya Media.

-------, 2004, *Gagasan Besar Ekonomi dan Kemajuan Kemanusiaan: Antara Ilmuwan dan Seniman Ekonomi*, Yogyakarta: Aditya Media.

-------, 2004, "Ekonomika Pasar-Populis", *Jurnal UNISIA,* No. 54/XXV11/IV/2004, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

-------, 2005, *Menggugat Ketimpangan dan Ketidakadilan Ekonomi Nasional*, Yogyakarta: Aditya Media dan PUSTEP UGM.

Mubyarto, dkk., 2014, *Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta: Lembaga Suluh Nusantara.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Nata, Abuddin., 2000, *Metodologi Studi Islam*, Cet V, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Piliang, Yasraf Amir., 2003, *Hipersemiotika: Tafsir Cultural Studies atas Matinya Makna*, Yogyakarta: Jalasutra.

Qardhawi, Yusuf., 1997, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press.

Rizal, Sofyan., 2011, "Titik temu dan Sinergi Ekonomi Islam dan Ekonomi Kerakyatan", *Jurnal Al Iqtishadi*, Vol III No. 1, Januari.

Santosa, Ery Wibowo Agung., "Ekonomi Islam dalam Konteks Ke-Indonesia-an (Perspektif Jalan Ketiga)", *Jurnal UNIMUS*, Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Semarang.

Salam, Abdul., 2011, "Interrelasi antara Etika dan Sistem Ekonomi: Studi Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun", *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, Vol I, No. 2, Bulan Desember.

Sarkaniputra, Murasa., "Pembangunan Pertanian Berbasis Kecerdasan Masyarakat", *Jurnal UNISIA*, No. 54/XXVII/IV/2004, Yogyakarta: UII.

Seff, Syauqi Mubarok., 2010, "Implementasi Demokrasi Ekonomi dalam Ekonomi Syariah", *Jurnal Harmoni*, Edisi Bulan Januari-Maret.

Soetrisno, Noer., 2004, "Etika sebagai Landasan Moral Pengembangan Kelembagaan Ekonomi", *Jurnal UNISIA*, No. 54/XXVII/IV/2004, Jurnal UII, Yogyakarta: UII Press.

Sudarto, 2002, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Suyuti, Jalaluddin, as., *al-Asybah wa an-Nazair fi al-Furu'*, Beirut: Daar al-Fikr.

Swasono, Sri Edi., 1987, *Membangun Sistem Ekonomi Nasional*, Jakarta: UI Press.

-------, 2004, *Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan: Kerakyatan, Nasionalisme dan Kemandirian*, Jakarta: UNJ Press.

Syari'ati, Ali., 1979, *On the Sociology of Islam*, terj. Hamid Algar, Berkeley: Mizan Press

Teeuw, 1983, *Membaca dan Menilai Sastra*, Jakarta: Gramedia.

Voll, John Obert., 1982, *Islam: Continuity and Change in the Modern World*, Boulder Colorado: Westview Press.

Zakiyuddin, 2006, *Konsep keadilan ekonomi dalam Al-Qur'an*, Disertasi, UIN Sunan Kalijaga–Yogyakarta.

Zarqa, Ahmad ibn Muhammad, az., 1989, *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, Damaskus: Daar al-Qalam.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Innani Mar'atus Sholichah, S.E.I
TTL	: Klaten, 1 September 1992
Jenis kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Alamat Sekarang	: Sonopakis Lor Rt 04 No. 304 A, Kasihan, Bantul
Alamat KTP	: PR Ngingas V/55 Rt 02 Rw 03, Barenglor, Klaten Utara, Klaten
No. HP	: 085728618945
Status	: Menikah
Email	: innanimaratus@gmail.com

Data Pendidikan

Pendidikan Formal

TK	: Perwanida Klaten	(1996 - 1998)
SD	: SDN IV Barenglor, Klaten	(1998 - 2004)
SMP	: MTs Mu'allimaat Muh	(2004 - 2007)
SMA	: MA Mu'allimaat Muh	(2007 - 2010)
S1	: UMY/FAI/EPI	(2010 - 2015)
S2	: UII/MSI/EI	(2015 - 2017)

Pendidikan Non Formal

SEKIMM (Sekolah IMMawati) PC IMM AR Fakhruddin Kota Yogyakarta (2011 - 2013)

Pengalaman Organisasi

1. DKP HW Qabilah Fatmawati Mu'allimaat Muhammadiyah Yogyakarta (2008-2009)
2. DS HW Kwartir Daerah Klaten (2007-2009)
3. DSP Kwartir Pusat Hizbul Wathan (2010-2015)
4. PK IMM FAI UMY (2011-2013)
5. PC IMM AR Fakhruddin Kota Yogyakarta (2013-2014)
6. Korp Instruktur PC IMM AR Fakhruddin Kota Yogyakarta (2011-2015)

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

PROGRAM PASCASARJANA (S2)
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II, Yogyakarta 55281, Telp./Faks. (0274) 523637, HP. 08175425758
Website : www.master.islamic.uii.ac.id; Email: msi@uii.ac.id dan msi_uii@yahoo.com

Nomor : 218/PPs-FIAI/V/2017 Yogyakarta, 30 Mei 2017
Hal : Permohonan Izin Wawancara

Kepada Yang Terhormat:
Kepala PUSTEP UGM
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Program Pascasarjana (S-2) Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

Nama	: INNIKSI MARYTUS SHOLICHAH
NIM	: 15913023
Konsentrasi	: EKONOMI ISLAM
Hp	: 085728618945

adalah Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses menuju penyusunan Tesis dengan judul: **"PEMIKIRAN EKONOMI KERAKYATAN MUBYARTO PERSPEKTIF ETIKA EKONOMI ISLAM DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PEMBANGUNAN KEADILAN EKONOMI DALAM DI INDONESIA"**.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk berkenan diwawancarai kepada yang bersangkutan.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Ketua Program
FIAI

Dr. Hufad, AH Sanaky, MSI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

PROGRAM PASCASARJANA (S2)
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II, Yogyakarta 55281, Telp./Faks. (0274) 523637, HP. 08175425758
Website : www.master.islamic.uii.ac.id; Email: msi@uii.ac.id dan msi_uii@yahoo.com

Nomor : 218/PPs-FIAI/V/2017
Hal : Permohonan Izin Wawancara

Yogyakarta, 30 Mei 2017

Kepada Yang Terhormat:
Bapak Prof. Dr. H. Edy Suandy Hamid, M.Ec
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Program Pascasarjana (S-2) Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

Nama	:	INNANI MARATUS SHOLICHAH
NIM	:	15912023
Konsentrasi	:	EKONOMI ISLAM
Hp	:	085728610945

adalah Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses menuju penyusunan Tesis dengan judul: **"PEMIKIRAN EKONOMI KERAKYATAN MUBYARTO PERSPEKTIF ETIKA EKONOMI ISLAM DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PEMBANGUNAN KEADILAN EKONOMI DAERAH DI INDONESIA"**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk berkenan diwawancarai sehubungan dengan penulisan tesis tersebut.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Ketua Prodi Magister,

FIAI

Dr. Hujair AH Sanaky, MSI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Hasil Wawancara PUSTEP UGM Yogyakarta

1. Apakah sesuai pernyataan dalam tesis ini yang menyatakan bahwa faktor yang mendorong munculnya gagasan ekonomi kerakyatan oleh Mubyarto yang paling kuat adalah dari dorongan internal?

   Jawaban: Benar bahwa pendorong munculnya gagasan ekonomi kerakyatan oleh Mubyarto karena kegelisahan Mubyarto yang melihat adanya dikotomi besar dalam perkembangan pemikiran ekonomi dunia yang selalu mengarah pada peran Negara dan peran pasar, dan Mubyarto mencoba menggali faktor ketiga yaitu peran masyarakat. Sehingga sistem ekonomi tidak hanya mengandalkan mekanisme pasar.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2. Apakah sesuai pernyataan dalam tesis ini yang menyatakan bahwa ekonomi kerakyatan Mubyarto adalah yang berkeadilan dan mengedepankan moral ketuhanan?

   Jawaban: Poin penting dalam gagasan ekonomi kerakyatan Mubyarto adalah proses mendudukkan masyarakat dalam posisinya (baik peran swasta, Negara dan masyarakat) terkait

modal dalam ekonomi, sehingga tercipta keadilan dalam melakukan aktivitas ekonomi.

3. Apakah sesuai pernyataan dalam tesis ini yang menyatakan bahwa ekonomi kerakyatan Mubyarto mempunyai kesamaan dengan ekonomi Islam?

   Jawaban: Nilai-nilai dalam ekonomi kerakyatan diambil dari isi Pancasila dan UUD 1945, dimana dalam batang tubuh UUD 1945 dan Pancasila terdapat gagasan ekonomi Islam yang mendudukkan segala sesuatu tidak dalam keserakahan melainkan dalam keadilan, sehingga ekonomi kerakyatan mempunyai nilai-nilai yang disamakan dengan nilai dari ekonomi Islam. Salah satunya adalah melihat keberhasilan sejarah di Indonesia dalam ekonomi Islam yang mampu membuat perkumpulan pedagang-pedagang Islam di Indonesia yang dinamakan Sarekat Islam atau Sarekat Dagang Islam yang menjadikan Mubyarto memperjuangkan ekonomi kerakyatannya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

4. Apakah sesuai pernyataan dalam tesis ini yang menyatakan bahwa nilai-nilai dari ekonomi kerakyatan Mubyarto mampu membangun keadilan ekonomi daerah di Indonesia dengan mengoptimalkan fungsi Negara?

   Jawaban: Pembangunan keadilan ekonomi daerah di Indonesia masih memerlukan usaha yang serius dan waktu yang panjang, karena menurut Mubyarto pembangunan ekonomi yang semestinya dibangun adalah manusianya. Bila manusia mempunyai kesadaran ekonomi yang baik, mandiri dan berkelanjutan maka pembangunan ekonomi akan bekerja ke arah yang lebih baik. Maka dalam penerapan ekonomi kerakyatan terdapat upaya Mubyarto dalam mendorong adanya organisasi-organisasi di masyarakat. Sehingga pentingnya keterlibatan masyarakat, swasta dan Negara menjadi keberhasilan dari pemikiran ekonomi kerakyatan Mubyarto. Sampai sekarang PUSTEP UGM sebagai lembaga yang fokus terhadap gagasan ekonomi kerakyatan Mubyarto terus berupaya mengkaji dan mengembangkan isu ekonomi yang ada dengan nilai ekonomi kerakyatan. Lembaga keuangan yang berlabel Islam pun diajak bekerja sama untuk

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

menyadari pentingnya pembangunan ekonomi yang tidak sekedar dalam rangka membantu, tetapi dijadikan sistem yang lebih menyeluruh, salah satunya yang telah dilakukan PUSTEP adalah mengajak kerjasama dengan asosiasi BMT dan lembaga zakat yang ada di Jetis terkait pemanfaatan dana zakat. Sehingga peran ekonomi Islam di masyarakat dapat mewujudkan keadilan dan sesuai dengan prinsip Islam itu sendiri.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Hasil Wawancara Prof Edy Suandi Hamid

1. Apakah sesuai pernyataan dalam tesis ini yang menyatakan bahwa faktor yang mendorong munculnya gagasan ekonomi kerakyatan oleh Mubyarto yang paling kuat adalah dari dorongan internal?

   Jawaban: Memang benar dorongan internal menjadi faktor pendorong dalam pemikiran Mubyarto, terutama melihat sistem ekonomi yang timpang dan para pemikir ekonomi yang bergerak dalam bidang pendidikan yang masih berkiblat pada ekonomi neoklasik, sehingga pemikiran terkait sistem

ekonomi dalam pembangunan ekonomi belum benar-benar disesuaikan dengan kultur masyarakat Indonesia.

2. Apakah sesuai pernyataan dalam tesis ini yang menyatakan bahwa ekonomi kerakyatan Mubyarto adalah yang berkeadilan dan mengedepankan moral ketuhanan?

   Jawaban: Masih mengupayakan penerapan model ekonomi kerakyatan dengan program pailit project dan program lainnya untuk bisa menciptakan sebuah ekonomi yang berkeadilan. Sehingga Mubyarto pun juga menyadari bahwa ekonomi yang berkeadilan masih dalam tahap pemikiran dari ekonomi kerakyatan dan masih butuh pengembangan-pengembangan untuk diterapkan dalam sistem ekonomi.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

3. Apakah sesuai pernyataan dalam tesis ini yang menyatakan bahwa ekonomi kerakyatan Mubyarto mempunyai kesamaan dengan ekonomi Islam?

   Jawaban: Mubyarto dalam salah satu tulisannya mengungkapkan terkait nilai-nilai ekonomi Islam yang pada

dasarnya terdapat juga dalam nilai ekonomi kerakyatan yang digagas Mubyarto.

4. Apakah sesuai pernyataan dalam tesis ini yang menyatakan bahwa nilai-nilai dari ekonomi kerakyatan Mubyarto mampu membangun keadilan ekonomi daerah di Indonesia dengan mengoptimalkan fungsi Negara?

   Jawaban: Di Indonesia sendiri masih belum sepenuhnya menerima terkait nilai keadilan dari ekonomi kerakyatan, apalagi dalam pendidikan ekonomi masih ekonomi kapitalis, sehingga butuh proses yang sangat panjang, dengan sistem ekonomi pasar yang digunakan Indonesia sampai saat ini.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA